



Edisi 1 Juli 2026 yang kedua:

## **NEGARA GAGAL (*FAILED STATE*)**

**Laporan Riset Maya Dr. Jan Hoesada,  
Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.**

### **Pendahuluan**

Makalah ini melengkapi makalah berjudul Makalah SDG dalam edisi 1 Juli 2026.

Setiap bangsa bercita-cita mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. PBB menyediakan kerangka acuan SDG yang dapat digunakan tiap negara sebagai salah satu sarana mencapai tujuan tersebut. Sebagian besar bangsa/negara di muka bumi mengindahkan kerangka acuan tersebut dan menggunakannya sebagai landasan pemerintahan yang ingin mengoordinasikan dirinya dengan derap langkah atau program PBB tersebut.

Terdapat negara gagal ber-SDG sehingga gagal mencapai kemakmuran, pada umumnya berciri negara nirdemokrasi dipimpin tirani/diktator zalim non-demokratis dan tidak sadar *trias politika*, juga negara-negara yang berkekuatan hanya 50 % SDM karena menzalimi perempuan cq membatasi hak-pendidikan & kebebasan perempuan di luar-rumah, dalam aktivitas politik & sosial-ekonomi cq mencari nafkah, dan berbagai negara cq pemerintahan yang tak mampu mengatasi/meredam konflik domestik dan gagal mencipta iklim-ekonomi nan-kondusif bagi kemakmuran, dan juga pemerintahan tidak bersih-korupsi, tidak profesional dan tidak kompeten.

NKRI merupakan salah satu negara di muka-bumi bersemangat tinggi menggunakan kerangka-pikir SDG PBB tersebut, yang sukses di terapkan melalui Bappenas, sesuai kondisi/situasi khas NKRI, dari tahun ke tahun NKRI ternyata mampu mencatat kemajuan peringkat global di antara bangsa-bangsa lain.

Makalah ini disajikan sebagai cermin, sebagai sarana introspeksi diri NKRI, membuka mata-batin bangsa agar tak terpelewat melakukan kesalahan negara-negara gagal.

Istilah "negara gagal" (*failed state*) sebagai judul makalah merujuk pada suatu negara yang pemerintahannya tidak mampu lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawab dasar sebagai pemerintahan yang berdaulat, seperti menyediakan layanan publik dan keamanan bagi warganya, serta kehilangan kendali efektif atas wilayahnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya sering menggunakan kerangka kerja dan data terkait negara rapuh (*fragile states*) atau lemah (*weak states*), meskipun tidak ada definisi tunggal yang disepakati secara universal atau "resmi" mengenai "negara gagal" dalam hukum internasional. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam wacana akademis, politik, dan jurnalistik.

Indeks Negara Gagal, yang kini resmi dikenal sebagai *Fragile States Index (Indeks Negara Rentan)*, adalah laporan tahunan yang disusun oleh *Fund for Peace* untuk mengukur kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhan. FFP adalah sebuah organisasi nirlaba swasta AS dengan situs [fundforpeace.org](http://fundforpeace.org) dan [fragilestatesindex.org](http://fragilestatesindex.org).

Meskipun demikian, keterlibatan PBB dalam persoalan negara-ringkih ini terlihat melalui:

- Penggunaan Data: PBB dan Bank Dunia menggunakan data dari sumber seperti Fragile States Index (sebelumnya Indeks Negara Gagal) yang dikembangkan oleh think tank Fund for Peace untuk menganalisis risiko dan kerentanan negara berdasarkan 12 indikator politik, sosial, dan ekonomi.
- Intervensi dan Bantuan: PBB terlibat dalam upaya bantuan kemanusiaan, pemeliharaan perdamaian, dan pembangunan negara (*nation-building*) di negara-negara yang mengalami konflik internal atau keruntuhan institusional.
- Responsibility to Protect (R2P): Doktrin ini, yang diadopsi PBB, menyatakan bahwa komunitas internasional harus turun tangan jika suatu negara "jelas gagal" melindungi rakyatnya dari kekejaman massal, yang mengimplikasikan adanya kriteria untuk menilai kegagalan suatu negara dalam menjalankan fungsi dasarnya.

### Ciri-ciri Umum Negara Gagal

Negara yang dianggap gagal umumnya menunjukkan ciri-ciri berikut:

- Kehilangan kendali teritorial: Pemerintah pusat tidak efektif dan sebagian besar wilayah dikuasai oleh faksi-faksi bersenjata, milisi, atau kelompok teroris.
- Erosi otoritas yang sah: Kurangnya legitimasi pemerintah di mata rakyatnya, sering kali akibat korupsi yang meluas atau proses demokrasi yang tidak berjalan.
- Ketidakmampuan menyediakan layanan publik: Gagal menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, peradilan, dan infrastruktur (listrik, air bersih).
- Ketidakstabilan ekonomi: Kemiskinan ekstrem, penurunan ekonomi yang tajam, dan ketergantungan pada ekonomi informal atau ilegal.
- Pelanggaran hak asasi manusia: Terjadinya kekerasan sipil, perpindahan penduduk secara massal (pengungsi internal dan eksternal), dan minimnya perlindungan hak asasi manusia.
- Indeks Negara Gagal, yang kini resmi dikenal sebagai *Fragile States Index (Indeks Negara Rentan)*, adalah laporan tahunan yang disusun oleh *Fund for Peace* (FFP) untuk mengukur kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhan, yang terklasifikasi sbb:
  - Kohesi: Aparat keamanan, perselisihan antar elit, dan keluhan kelompok masyarakat.
  - Ekonomi: Penurunan ekonomi, pembangunan yang tidak merata, dan fenomena "brain drain" (pelarian modal manusia).
  - Politik: Legitimasi negara, kualitas layanan publik, serta penegakan hak asasi manusia dan hukum.
  - Sosial: Tekanan demografis, pengungsi (internal maupun eksternal), serta intervensi dari luar negeri.

Hingga data terbaru FFP tahun 2026, peringkat Negara Paling Rentan (Data 2025/2026) adalah sebagai berikut.

Negara dengan skor tertinggi menunjukkan tingkat ketidakstabilan yang paling parah:

1. Somalia: Menempati posisi teratas akibat konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan.
2. Sudan: Mengalami lonjakan kerentanan signifikan akibat perang saudara yang berlanjut.
3. Sudan Selatan: Masalah kronis pada layanan publik dan keamanan.
4. Suriah: Dampak dari perang saudara dan fragmentasi wilayah yang belum usai.
5. Republik Demokratik Kongo: Ketidakstabilan ekonomi dan konflik bersenjata di wilayah timur.

Dua belas Indikator Pengukuran Negara-Gagal

Indeks kebangkrutan negara ini menggunakan metodologi CAST yang menilai negara berdasarkan skor 0–10 dalam empat kategori besar:

- Kohesi: Aparat keamanan, perselisihan antar elit, dan keluhan kelompok masyarakat.
- Ekonomi: Penurunan ekonomi, pembangunan yang tidak merata, dan fenomena "brain drain" (pelarian modal manusia).
- Politik: Legitimasi negara, kualitas layanan publik, serta penegakan hak asasi manusia dan hukum.
- Sosial: Tekanan demografis, pengungsi (internal maupun eksternal), serta intervensi dari luar negeri.

#### Fungsi dan Kritik

- Fungsi: Digunakan oleh lembaga internasional, investor, dan pembuat kebijakan untuk memetakan risiko investasi serta memprioritaskan bantuan kemanusiaan.
- Kritik: Beberapa kritikus berpendapat istilah "Negara Gagal" terlalu stigmatis (sehingga diubah menjadi "Negara Rentan") dan metodologinya dianggap terlalu condong pada standar demokrasi Barat.

Pembaca dapat melihat peta interaktif dan data lengkap setiap negara melalui situs resmi *Fragile States Index*.

#### Indonesia dalam FSI 2024

- Peringkat: 102 dari 179 negara.
- Skor: 63,7 (menurun dari 65,6 tahun sebelumnya).
- Kategori: Termasuk dalam kategori "Warning" (Peringatan), menunjukkan kerentanan yang lebih terkendali.
- Tren: Skor Indonesia mencapai titik terendah sejak 2007, menandakan stabilitas yang meningkat berkat tata kelola birokrasi yang membaik.

### **Analisis Penyebab Negara Gagal**

Pemeringkatan SDG PBB oleh PBB menyimpulkan berbagai negara yang tak berhasil mencapai kemakmuran melalui sistem SDG, adalah sebagai berikut.

#### **Guinea**

Guinea adalah sebuah negara di Afrika Barat yang kaya sumber daya alam (terutama bauksit, emas, dan berlian) dan menjadi hulu bagi sungai-sungai besar Afrika Barat seperti Niger, Gambia, dan Senegal. Ibu kotanya adalah Conakry, yang juga dikenal sebagai Guinea-Conakry untuk membedakannya dari Guinea-Bissau dan Guinea Khatulistiwa. Negara ini memiliki sejarah kolonial Prancis dan merdeka pada tahun 1958.

#### **Informasi Kunci:**

- Lokasi: Afrika Barat, berbatasan dengan Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, dan Samudra Atlantik.
- Ibu Kota: Conakry.
- Sistem Pemerintahan: Republik.
- Bahasa Resmi: Prancis (bahasa resmi), dengan banyak bahasa lokal.
- Ekonomi: Kaya akan mineral (bauksit, emas, berlian) dan pertanian.
- Geografi: Memiliki empat wilayah utama: pesisir, dataran tinggi Fouta Djallon, sabana utara, dan hutan hujan tenggara.
- Etnis: Terdapat banyak kelompok etnis, termasuk Fula (Peuhl), Mandinka (Malinke), dan Soussou.

#### **Fakta Menarik:**

- Tiga sungai besar Afrika (Niger, Senegal, dan Gambia) bermula dari pegunungan di Guinea.
- Guinea memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia.

Guinea adalah negara yang secara strategis penting karena lokasinya, sumber daya alamnya yang melimpah, dan peranannya dalam membentuk lanskap hidrologi Afrika Barat.

### Konstitusi

Konstitusi Guinea mengalami perubahan signifikan, dengan versi terakhir yang disahkan pada tahun 2010, tetapi dibekukan setelah kudeta militer pada September 2021, yang kemudian diganti sementara oleh Piagam Transisi yang mengatur negara hingga pemulihan pemerintahan sipil, menetapkan struktur presidensial dan legislatif, meskipun negara masih dalam transisi konstitusional dan politik yang kompleks.

### Agama Utama

Agama utama di negara Guinea adalah Islam, yang dianut oleh sekitar 85-90% penduduk, terutama Sunnimengikuti tradisi hukum Maliki dan tarekat Sufi seperti Qadiri dan Tijani.

Indeks Kepailitan Negara. Guinea baru-baru ini menerima peringkat kredit pertamanya dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada September 2025:

- Peringkat Jangka Panjang: B+
- Peringkat Jangka Pendek: B
- Prospek (Outlook): Stabil

Peringkat B+" ini menempatkan Guinea *dalam kategori "spekulatif" atau non-investment grade*, yang menunjukkan adanya risiko kredit, namun prospeknya yang stabil menunjukkan bahwa risiko gagal bayar dalam jangka pendek dianggap rendah.

Faktor-faktor yang mendasari peringkat ini meliputi:

- Prospek Pertumbuhan Kuat: Didorong oleh sektor pertambangan yang kuat (bauksit dan proyek bijih besi Simandou yang akan datang).
- Tingkat Utang yang Rendah: Utang publik diperkirakan tetap di bawah 3% dari PDB hingga 2028.
- Disiplin Fiskal: Manajemen utang yang hati-hati dan kinerja fiskal yang baik.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk indikator tata kelola pemerintahan yang lemah dan ketidakpastian politik. Pemerintah berencana mendirikan dana kekayaan kedaulatan (*sovereign wealth fund*) pada tahun 2027 untuk membantu menstabilkan ekonomi dari volatilitas harga komoditas.

Indeks budaya bangsa. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International, Guinea (Republik Guinea) mendapat skor 28 dari 100 dan menempati peringkat ke-133 dari 180 negara, *menunjukkan tingkat korupsi yang signifikan di sektor publiknya*. Negara ini berada di posisi bawah, bersama dengan negara-negara lain di Afrika yang menghadapi tantangan korupsi tinggi.

- Skor: 28/100 (skor rendah, 0 sangat korup, 100 sangat bersih).
- Peringkat: 133 dari 180 negara.
- Sumber: *Transparency International dan Trading Economics*.

Kejahatan Kekerasan: *Kejahatan kekerasan marak terjadi, termasuk perampokan bersenjata, penyerangan, perampokan rumah, pembajakan mobil, dan penjambretan.*

Kejahatan Oportunistik: Terdapat risiko besar kejahatan oportunistik seperti pencopetan dan pencurian barang berharga, terutama di daerah perkotaan dan pada malam hari.

Kejahatan Terorganisasi: Guinea juga terlibat dalam kejahatan terorganisasi, terutama yang

berkaitan dengan sumber daya alam. *Negara ini adalah sumber dan pusat ekspor emas ilegal, dengan rute penyelundupan ke Mali dan Uni Emirat Arab. Sektor ekstraktif (bauksit, emas, berlian) dinilai keruh dan rawan korupsi. Perdagangan satwa liar ilegal, khususnya burung penyanyi, juga terjadi.*



Peringatan Perjalanan:  
Departemen Luar Negeri AS

dan lembaga keamanan lainnya telah mengeluarkan *peringatan perjalanan untuk Guinea, menyarankan warganya untuk berhati-hati dan mencatat bahwa penegakan hukum setempat mungkin memiliki kemampuan terbatas untuk menanggapi kejahatan serius.*

Tingkat kejahatan. Guinea menghadapi tantangan signifikan terkait indeks kejahatan umum dan, secara khusus, tingkat kekerasan berbasis gender yang sangat tinggi.

Indeks Kejahatan Umum

Kejahatan kekerasan tersebar luas di Guinea, terutama di ibu kota, Conakry.

Jenis kejahatan yang sering dilaporkan meliputi:

- Perampokan bersenjata
- Penyerangan
- Pembajakan mobil (carjacking)
- Pembobolan rumah
- Pencopetan dan penjam-bretan

Kejahatan ini menjadi lebih umum, terutama pada malam hari, sebagian dilakukan oleh individu yang mengenakan seragam polisi atau militer.

Kekerasan Gender (KGB)

Kondisi gender. *Guinea termasuk salah satu negara dengan ketidaksetaraan gender tertinggi di dunia, menempati peringkat 182 dari 191 negara dalam Indeks*

Ketidaksetaraan Gender UNDP pada 2021-2022.

*Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang meluas dan serius:*

- Prevalensi Tinggi: Diperkirakan 9 dari 10 perempuan berusia 15 hingga 64 tahun di Guinea pernah menjadi korban setidaknya satu tindakan kekerasan fisik. Survei nasional pada tahun 2016 melaporkan 55,7% perempuan menjadi korban kekerasan fisik dan 29,3% kekerasan seksual.
- Kekerasan Pasangan Intim: Sekitar 20,8% perempuan berusia 15-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim saat ini atau mantan pasangan dalam 12 bulan sebelumnya (data 2018).
- Mutilasi/Pemotongan Genital Perempuan (FGM/C): Praktik ini sangat mengakar kuat di Guinea, dengan tingkat prevalensi yang sangat tinggi. Menurut survei UNICEF 2018, 94,5% perempuan dan anak perempuan berusia 15 hingga 49 tahun telah menjalani prosedur ini.
- Pernikahan Anak: Pernikahan dini dan paksa marak terjadi. Sekitar 46,5% perempuan berusia 20-24 tahun menikah atau menjalin hubungan sebelum usia 18 tahun.
- Hambatan Hukum dan Sosial: Meskipun hukum Guinea mengkriminalisasi pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus ini jarang dituntut secara efektif. Korban sering kali menolak melapor ke polisi karena stigma, takut akan pembalasan,

dan kurangnya kerja sama dari pihak berwenang. Kerangka hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan masih dinilai lemah.

- Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa perempuan di Guinea menghadapi kerentanan yang signifikan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi gender.

Indeks demokrasi. Guinea memiliki kinerja demokrasi yang rendah dan cenderung menurun, terutama setelah kudeta 2021, dengan skor rendah dalam representasi, hak, dan aturan hukum, meskipun ada sedikit perbaikan dalam kebebasan ekonomi tahun 2025, namun secara umum masih dikategorikan "sebagian besar tidak bebas" akibat korupsi dan instabilitas politik yang tinggi

#### Kinerja Demokrasi Guinea

- Indeks Demokrasi Global (International IDEA): Guinea berada di 25% negara terbawah, menunjukkan kinerja buruk dalam Representasi, Hak, dan Aturan Hukum, dengan penurunan signifikan pasca-2021 kudeta militer.
- Indeks Kebebasan Ekonomi (Heritage Foundation 2025): Skornya 54.6, peringkat 123 dunia, dikategorikan "sebagian besar tidak bebas" karena korupsi, penegakan hukum lemah, dan sejarah pemerintahan tidak demokratis.
- Indeks Persepsi Korupsi (Transparency.org): Mendapat skor 28 (dari 100) dan peringkat 133 dari 180 negara, menunjukkan tingkat korupsi sektor publik yang tinggi.
- Indeks Demokrasi Elektoral (The Global Economy): Mencatat penurunan, dengan skor 0.161 pada 2024, jauh di bawah rata-rata dunia (0.489), menunjukkan tantangan besar dalam pemilu yang bebas dan adil.

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi

- Ketidakstabilan Politik: Kudeta tahun 2021 secara langsung berdampak negatif pada indikator demokrasi.
- Korupsi dan Penegakan Hukum: Sistem peradilan yang lemah dan korupsi menghambat pembangunan dan kebebasan warga.
- Ketergantungan Ekonomi: Ketergantungan pada sumber daya alam (bauksit, emas) namun pembangunan ekonomi lambat akibat masalah tata kelola.

Secara keseluruhan, Guinea menghadapi tantangan / hambatan serius dalam membangun demokrasi yang berkualitas, stabil dan fungsional, ditandai dengan skor rendah di berbagai indeks dan tren penurunan.

#### Indeks pendidikan

Indeks pendidikan Guinea secara umum masih rendah karena akses kepada fasilitas pendidikan amat terbatas, kualitas pengajaran buruk, infrastruktur kurang memadai, dan kesenjangan gender yang signifikan, meskipun ada upaya perbaikan; data terbaru (sekitar 2021-2022) menunjukkan angka partisipasi dasar yang menurun, tingkat buta huruf, serta rendahnya pencapaian literasi dan matematika di tingkat dasar, dengan fokus perbaikan pada pelatihan guru dan kesetaraan gender, terutama pendidikan anak perempuan, laporan UNICEF dan {Link: Global Partnership for Education (GPE)}.

#### Indikator Utama Pendidikan Guinea:

- Tantangan Akses & Kualitas: Banyak anak pedesaan kesulitan mengakses fasilitas sekolah, guru kurang terlatih, fasilitas dasar kurang, dan isu kekerasan berbasis gender di sekolah.
- Kesenjangan Gender: Tingkat kelulusan SD/SMP lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan, dengan hambatan seperti jarak sekolah, sanitasi buruk, dan pernikahan anak, meskipun ada paritas di SD.
- Hasil Pembelajaran: Pada akhir SD, banyak siswa belum mencapai kompetensi

minimum membaca dan matematika (data PASEC 2019).

- Indeks Pendidikan PBB (2021): Menunjukkan nilai 0.414, dengan lama sekolah rata-rata 8.08 tahun (2019) dan Indeks Ketimpangan Gender 0.627, menunjukkan kerugian bagi perempuan.

Upaya Pemerintah & Mitra:

- Peningkatan Kualitas Guru: Melalui pelatihan guru di semua jenjang dan perbaikan remunerasi.
- Fokus Pendidikan Anak Perempuan: Mengatasi hambatan sistemik dan mempromosikan pendidikan perempuan.
- Pakta Kemitraan Guinea (GPE): Komitmen nasional untuk menyediakan pendidikan berkualitas, termasuk perbaikan infrastruktur dan lingkungan belajar.

Secara keseluruhan, Guinea menghadapi masalah struktural dalam pendidikannya, pemerintah dan mitra bekerja sama untuk meningkatkan akses dan kualitas, dengan penekanan kuat pada mengatasi ketimpangan gender dan meningkatkan kompetensi siswa dasar.

Indeks pengangguran. Tingkat pengangguran di Guinea (negara Afrika Barat) adalah sekitar 5,2% pada tahun 2024, menurun dari tahun sebelumnya, melebihi batas tidak sehat 5 %.

Indeks PDB Perkapita. PDB per kapita Guinea bervariasi tergantung sumber datanya, namun menunjukkan tren peningkatan dari negara berpendapatan rendah menjadi menengah ke bawah, dengan estimasi sekitar \$1,05 ribu (2024) hingga \$1,18 ribu (2023),

Indeks Kesetaraan gender. Berdasarkan data terbaru, Guinea memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang nan-tinggi, dengan skor *Indeks Ketimpangan Gender (GII)* 0.61 pada tahun 2022 menurut *World Population Review*, yang menempatkannya di level yang sama dengan Mali dan Sierra Leone. Ketimpangan ini terlihat di berbagai sektor seperti kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja, dengan tantangan besar pada perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, meskipun pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka hukum kesetaraan gender.

Detail Indikator:

- Indeks Ketimpangan Gender (GII) (2022): 0.61 (skor tinggi menunjukkan ketimpangan tinggi).
- Kesehatan dan Pendidikan: Ada kesenjangan dalam pendaftaran pendidikan menengah dan tinggi, dengan perempuan menghadapi hambatan lebih besar.
- Pemberdayaan: Kesetaraan gender masih rendah, meskipun ada upaya untuk meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen dan posisi menteri.
- Kekerasan: Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak, sangat tinggi di Guinea.

Upaya dan Tantangan:

- Guinea telah mengadopsi kebijakan nasional untuk kesetaraan gender dan memerangi kekerasan berbasis gender, seperti Rencana Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan Kebijakan Gender Nasional., dan belum ( tidak ?) berhasil
- Tantangan utama adalah implementasi efektif dari kebijakan ini, yang terhambat oleh kurangnya mekanisme kelembagaan pemerintahan nan-buruk dan sumber daya operasional pemerintahan nan-buruk.

Secara keseluruhan, meskipun ada kerangka kebijakan, Guinea masih menghadapi masalah struktural dan budaya Patriakis ribuan-tahun yang signifikan menghalangi dalam mencapai kesetaraan gender, terlihat dari skor GII yang tinggi dan data spesifik tentang kesehatan dan pemberdayaan.

## Mali

Mali tidak beriklim demokratis.

### Konstitusi

Junta militer mengambil alih Konstitusi Mali sebagai hukum tertinggi Republik Mali, yang mendefinisikan negara sebagai republik demokratis, sekuler, dan sosialis dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta mengatur lembaga-lembaga republik seperti Presiden, Pemerintah, dan Parlemen, namun tidak terlaksana, ditangguhkan pasca kudeta 2012, konstitusi baru disahkan melalui referendum pada Juli 2023, mengukuhkan kembali sistem multipartai, meskipun junta militer masih memegang kendali dan ada kekhawatiran pelemahan demokrasi.

### Agama Utama

Agama utama di Mali adalah Islam, dianut oleh sekitar 90-95% penduduk, sebagian besar menganut Sunni mazhab Maliki dan dipengaruhi Sufisme; agama tradisional Afrika (seperti suku Dogon) dan agama Kristen (Katolik, Protestan) menjadi minoritas. Negara secara konstitusional berbentuk sekuler dan mempraktikkan toleransi antar agama, meski terdapat ekstremisme-agama di beberapa wilayah. Hampir seluruh populasi memeluk Islam, seringkali mencampur-aduk praktik ekstrim Islam dengan tradisi lokal kuna, termasuk pemujaan leluhur dan unsur mistik. Secara historis, Islam dan agama-radisional hidup berdampingan secara damai, tetapi dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan interpretasi Islam konservatif dan ekstremisme di Mali Utara.

### Indeks Kepailitan Negara

Lembaga keuangan internasional menilai risiko kesulitan utang (*debt distress*) Mali berada pada tingkat moderat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kerentanan ekonomi nan-signifikan.

- Risiko Utang Moderat: Analisis keberlanjutan utang bersama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menilai risiko kesulitan utang eksternal dan keseluruhan Mali sebagai moderat. Ini berarti utang negara masih dianggap berkelanjutan dalam skenario dasar, meskipun ruang untuk menyerap guncangan ekonomi (seperti penurunan harga komoditas atau krisis politik) terbatas.
- Peningkatan Kerentanan: Meskipun peringkat risikonya moderat, kerentanan telah meningkat karena beberapa faktor, termasuk ketidakstabilan politik, masalah keamanan internal, krisis energi, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi di pasar regional Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat (WAEMU).
- Tingkat Utang: Rasio utang publik terhadap PDB Mali diperkirakan sekitar 52,9% pada tahun 2025, yang relatif moderat dibandingkan dengan banyak negara lain, namun utang luar negeri merupakan bagian yang cukup besar.
- Kondisi Ekonomi Makro: Mali adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian. Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan meningkat, didorong oleh sektor pertambangan (emas dan dimulainya produksi lithium). Namun, prospek ini menghadapi risiko penurunan yang substansial.
- Peringkat Korupsi: Mali berada di peringkat ke-135 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dilaporkan oleh Transparency International, menunjukkan tingkat korupsi sektor publik yang tinggi, yang dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun Mali tidak berada dalam kondisi "pailit" secara resmi, negara

ini menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang serius yang meningkatkan risiko fiskal dan ketidakpastian di masa depan. World Bank Group

### Indeks budaya

Bangsa Mali menghadapi masalah korupsi serius; pada Indeks Persepsi Korupsi 2024 Transparency International, Mali berada di peringkat ke-135 dari 180 negara, dengan skor rendah 27 (skala 0-100), menunjukkan sektor publik yang sangat korup dan kepercayaan publik yang rendah. Korupsi merajalela di berbagai tingkat pemerintahan, memperburuk krisis multidimensi di negara itu, meskipun ada upaya legislatif baru seperti undang-undang anti-pengayaan ilegal.

Data Korupsi Mali (Indeks Persepsi Korupsi 2024):

- Skor: 27 (dari 100).
- Peringkat: 135 dari 180 negara.
- Tren Historis: Skor Mali rata-rata di kisaran 113-137 sejak 2003, menunjukkan tingkat korupsi yang konsisten tinggi.

Konteks dan Dampak:

- Merasuki Lembaga Kepemerintahan: Korupsi merusak semua lembaga negara Mali, mengurangi legitimasi pemerintah.
- Kepercayaan Publik Rendah: Warga Mali melaporkan tingkat korupsi yang tinggi dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara.
- Korupsi Memperburuk Krisis: Korupsi memperburuk konflik dan keterasingan di kalangan warga Mali.
- Upaya Anti-Korupsi: Mali telah memperkenalkan undang-undang baru, seperti anti-pengayaan ilegal, dan membentuk Kantor Pusat Anti-Korupsi, namun implementasinya “jauh panggang dari api” (?) masih terus berlangsung (?).

Sebagai kesimpulan, Mali termasuk negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, dengan tantangan struktural yang mendalam, upaya hukum-positif untuk memerangi kelihatan gagal.

Budaya buruk anti-HAM berlangsung ribuan tahun, kondisi sosial penuh kekerasan-fisik dan ketidak-adilan gender. Mali memiliki indeks ketidaksetaraan gender yang sangat tinggi dan tingkat kekerasan berbasis gender yang tersebar luas, menjadikannya salah satu negara dengan kondisi terburuk secara global untuk perempuan dan anak perempuan. Konflik dan kerentanan di negara tersebut memperburuk situasi ini.

Mali secara konsisten menempati peringkat sangat rendah pada Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) yang disusun oleh UNDP:

- Pada laporan tahun 2021, Mali berada di peringkat 155 dari 170 negara.
- Peringkat lain menempatkan Mali lebih rendah lagi, seperti peringkat 138 dari 142 negara oleh World Economic Forum (WEF), yang menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Mali adalah masalah hak asasi manusia yang meluas dan sering kali tidak dilaporkan karena tekanan sosial dan kurangnya akses terhadap keadilan.
- Prevalensi Tinggi: Sebuah survei demografi dan kesehatan tahun 2018 menemukan bahwa satu dari dua perempuan Mali berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.
- Kekerasan Pasangan Intim: Terdapat budaya sadis pada ranah domestik. Sekitar 27% perempuan di Mali telah mengalami kekerasan dari pasangan intim, setara dengan rata-rata global.

- Mutilasi Genital Perempuan (FGM): Praktik berbahaya ini tetap tersebar luas, dengan perkiraan 86% anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun telah mengalaminya. Praktik ini belum dikriminalisasi secara hukum di Mali.
- Konteks Konflik: Krisis keamanan dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Mali utara dan tengah meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap KBG, termasuk kekerasan seksual, eksploitasi, dan pernikahan paksa, yang terkadang digunakan sebagai senjata perang oleh kelompok bersenjata.
- Laporan PBB dan organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang memengaruhi warga sipil secara umum, dan perempuan secara khusus, di zona konflik. PBB tak berfungsi.

Indeks demokrasi. Mali memiliki skor demokrasi yang rendah dan berada di peringkat bawah secara global, ditandai penurunan signifikan dalam representasi, hak, dan aturan hukum pasca-kudeta militer 2020; Mali termasuk dalam 25% terbawah negara dalam hal beberapa faktor demokrasi dan sangat bergantung pada pertanian, dengan indeks pembangunan manusia yang juga rendah, mencerminkan tantangan serius dalam kualitas demokrasinya.

#### Kondisi Demokrasi di Mali:

- Kinerja Demokrasi Rendah: Mali menunjukkan kinerja yang lemah dalam kerangka demokrasi global, khususnya pada kategori Representasi, Hak, dan Aturan Hukum, meskipun partisipasinya berada di kisaran menengah.
- Faktor Penurunan Partisipasi Publik : Terjadi penurunan tajam dalam partisipasi, representasi, dan hak-hak sipil, terutama akibat kudeta militer 2020 yang mengangkat junta ke tampuk kekuasaan.
- Peringkat Bawah Demokrasi dan IPM: Mali termasuk dalam 25% terbawah negara di dunia untuk beberapa faktor demokrasi dan berada di peringkat terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Tantangan Sosial Ekonomi: Negara ini menghadapi kendala/tantangan besar seperti kebodohan, kemiskinan ekstrem, ketimpangan, dan ketergantungan tak-sehat pada pertanian subsisten/tradisional, yang memperburuk kondisi demokrasi.

#### Metodologi Penilaian (Berdasarkan Indeks Demokrasi):

- Indeks Demokrasi (seperti yang diterbitkan oleh The Economist Group) menilai kualitas demokrasi berdasarkan 60 indikator dalam 5 kategori utama, termasuk pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik.
- Negara-negara diklasifikasikan menjadi demokrasi penuh, demokrasi cacat (flawed democracies), rezim hibrida, atau rezim otoriter berdasarkan skor mereka.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Mali amat buruk dan sedang dalam tekanan kuat junta-militer dan mengalami kemunduran signifikan akibat ketidakstabilan politik dan tantangan sosial-ekonomi yang parah.

Indeks pendidikan. Indeks pendidikan umum dan partisipasi angkatan kerja wanita di Mali amat buruk, ditandai dengan tingkat literasi yang rendah dan partisipasi formal di pasar kerja yang juga rendah dibandingkan dengan laki-laki.

#### Indeks Pendidikan Wanita Mali sbb :

- Tingkat Literasi Dewasa: Pada tahun 2020, tingkat melek huruf total dewasa (usia 15 tahun ke atas) di Mali adalah sekitar 31%. Angka spesifik untuk perempuan cenderung lebih rendah dari rata-rata nasional ini, meskipun data pastinya tidak tersedia dalam hasil pencarian.
- Partisipasi Sekolah: Meskipun pendidikan dasar di Mali gratis dan wajib, lebih dari

separuh pemuda berusia 15 hingga 24 tahun tidak melek huruf, yang mengindikasikan hambatan besar dalam menyelesaikan pendidikan formal, terutama bagi anak perempuan.

- Penyelesaian Pendidikan Menengah Atas: Pada tahun 2020, hanya sekitar 3,2% populasi (mendekati 0%) perempuan berusia 25 tahun ke atas yang setidaknya telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.

#### Angkatan Kerja Wanita Mali

- Tingkat Partisipasi: Data spesifik mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Mali tidak langsung tersedia dalam hasil pencarian, namun data Bank Dunia tentang gender mengindikasikan kesenjangan yang signifikan. Secara umum, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di negara berkembang cenderung stagnan atau jauh di bawah % pekerja laki-laki.
- Tingkat Pengangguran: Senjangan gender dan pemerkerjaan amat besar. Tingkat pengangguran nasional di Mali dilaporkan sebesar 2,39% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,10% pada tahun 2024 (perkiraan). Angka ini mencakup seluruh populasi dan tidak memberikan gambaran spesifik untuk perempuan, yang seringkali menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi atau berada di sektor informal.
- Konteks Gender: Mali memiliki Kebijakan Gender Nasional yang bertujuan untuk kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, namun kendala/tantangan budaya patriarkhis ribuan-tahun dan hambatan struktural pria-wanita yang masih sangat mengakar, yang memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang kerja formal.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa perempuan di Mali menghadapi kendala yang signifikan dalam mengakses pendidikan formal dan partisipasi penuh dalam angkatan kerja modern. Untuk informasi lebih rinci, portal data gender Bank Dunia menyediakan statistik terperinci mengenai indikator pembangunan gender di Mali.

Terdapat anomali dari kondisi tersebut di atas, indeks pengangguran. Indeks pengangguran di Mali tergolong sangat rendah, sekitar 3,10% pada tahun 2024, naik sedikit dari 3% di tahun 2023, dengan rata-rata historis sekitar 1,74% dari 1991-2024, karena sektor informal dan pertanian menyerap banyak tenaga kerja, meskipun angka ini bervariasi, mencapai puncaknya 4,00% (2021) dan terendah 1,30% (2001).

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- Perempuan bekerja seadanya, menyebabkan tingkat pengangguran rendah, namun tingkat PDB perkapita juga rendah.
- Sektor Informal & Pertanian: Sektor informal dan kegiatan pertanian menjadi penyerap tenaga kerja utama, menjaga angka pengangguran tetap rendah.
- Variasi Historis: Tingkat pengangguran di Mali berfluktuasi, tertinggi 4,00% (2021) dan terendah 1,30% (2001).

#### Sumber Data:

- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Trading Economics.

Indeks PDB Perkapita. PDB per kapita Mali relatif rendah, sekitar \$ 908.08 USD pada tahun 2024 (menurut Trading Economics) dan diproyeksikan naik menjadi sekitar \$ 1,014 USD pada tahun 2025 (menurut Worldometer), mencerminkan statusnya sebagai negara berpendapatan rendah yang bergantung pada pertanian dan bantuan asing, dengan tantangan ketidakstabilan politik dan iklim.

#### Data PDB per Kapita Terbaru:

- Tahun 2024 (Estimasi): \$908.08 USD (nominal).
- Tahun 2025 (Proyeksi): \$1,014 USD (nominal).

- PDB per Kapita PPP (Purchasing Power Parity): Rata-rata \$2328.84 USD dari 1990-2024, dengan puncak di \$2916.17 USD pada 2019.

Konteks Tambahan:

- Peringkat: *Mali adalah salah satu negara termiskin di dunia*, peringkat ke-136 dari 145 negara berdasarkan ekonomi per kapita.
- Kendala/Tantangan: Pertumbuhan penduduk cepat, pertanian subsisten, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik mempengaruhi ekonominya.
- Sumber Pendapatan: Sangat bergantung pada bantuan asing dan kiriman uang, dengan pertanian dan pertambangan menjadi sektor penting.

Indeks Kesetaraan Gender

Mali menghadapi hambatan/tantangan kesetaraan gender yang signifikan, berada di peringkat 155 dari 170 negara dalam Indeks Ketimpangan Gender (GII) UNDP 2021, menunjukkan masalah besar dalam kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan pasar tenaga-kerja, dengan tingkat kematian ibu tinggi, kekerasan berbasis gender marak, dan partisipasi kerja perempuan jauh di bawah laki-laki, meskipun ada kebijakan nasional yang mendukung kesetaraan.

Data Utama tentang Kesetaraan Gender di Mali

- Peringkat GII (UNDP 2021): 155 dari 170 negara, menandakan ketimpangan tinggi.
- Kesehatan: Angka kematian ibu sangat tinggi, dan perempuan menghadapi hambatan dalam kesehatan reproduksi.
- Pendidikan: Pencapaian pendidikan perempuan sangat rendah (hanya sekitar 8% menyelesaikan SMP) dibandingkan laki-laki (15.5%).
- Pasar Tenaga Kerja: Partisipasi angkatan kerja perempuan (58%) jauh lebih rendah dari laki-laki (80.3% pada 2024), dan kesenjangan ini melebar di kelompok berpenghasilan rendah.
- Kekerasan Berbasis Gender (GBV): Tersebar luas, dengan 18.4% perempuan usia 15-49 mengalami kekerasan fisik/seksual dari pasangan intim pada 2018.
- Pekerjaan Tanpa Upah (Unpaid Care Work): Perempuan menghabiskan 22.1% waktu untuk ini, sementara laki-laki hanya 1.7%.

Kebijakan dan Hambatan/Tantangan

- Mali memiliki Kebijakan Gender Nasional (PNG-Mali) 2011 dan konstitusi yang menjamin kesetaraan, namun tidak di implementasi, data yang kurang memadai menghambat kemajuan.
- Tantangan utama meliputi: kematian ibu, kekerasan seksual, akses terbatas ke pendidikan & layanan kesehatan, serta kesenjangan ekonomi yang besar.

Secara keseluruhan, Mali menunjukkan kerentanan gender yang parah di berbagai sektor, meskipun ada kerangka hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan.

## Haiti

Konstitusi

Konstitusi Haiti yang berlaku saat ini adalah hasil amandemen tahun 2012 dari Konstitusi 1987, yang mendefinisikan Haiti sebagai republik demokratis dengan sistem eksekutif ganda (Presiden dan Perdana Menteri) serta parlemen bikameral, mengakui bahasa Kreol dan Prancis sebagai bahasa resmi, menekankan hak dasar, dan mengatur desentralisasi pemerintah dengan otonomi administrasi untuk departemen dan komune.. Dokumen ini mengadopsi model dari konstitusi AS, Polandia, dan Prancis, menetapkan Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

## Agama Utama

Agama utama di Haiti adalah Kristen, dengan mayoritas menganut Katolik Roma (sekitar 50-60%) dan sebagian besar lainnya Protestan (sekitar 30%), namun seringkali dipraktikkan bersamaan dengan agama rakyat Vodou (Voodoo) yang mencampurkan unsur Afrika dan Eropa, sehingga banyak orang Haiti menganut dua keyakinan sekaligus (sinkretisme).

### Detail Agama Utama:

- Katolik Roma: Denominasi Kristen yang dominan karena sejarah kolonialisme Prancis, meskipun Vodou sering dipraktikkan secara paralel.
- Protestan: Jumlahnya signifikan dan terus berkembang, dengan banyak denominasi seperti Baptis, Metodis, dan Advent Hari Ketujuh.
- Vodou (Voodoo): Agama rakyat Afro-Karibia yang merupakan campuran kepercayaan Afrika Barat, Katolik, dan unsur Taino, di mana banyak umat Katolik juga mempraktikkan Vodou (sinkretisme).

Voodoo Haiti (atau Vodou Haiti) adalah sebuah agama spiritual berbasis leluhur yang berasal dari Afrika Barat dan berkembang di Haiti. Makna utamanya lebih dari sekadar kepercayaan; ini adalah cara hidup yang mencakup filosofi, pengobatan, keadilan, dan etika, yang diturunkan lintas generasi melalui tradisi lisan.

### Prinsip dan Kepercayaan Utama

- Monoteisme dengan perantara: Penganut Vodou percaya pada dewa tertinggi pencipta yang disebut Bondye (dari bahasa Prancis *Bon Dieu* yang berarti "Tuhan yang Baik"). Bondye dianggap mahakuasa tetapi jauh dan tidak terlibat langsung dalam urusan manusia sehari-hari.
- Pemujaan roh (*Lwa*): Karena Bondye dianggap jauh, penganut Vodou melayani dan berkomunikasi dengan roh-roh yang disebut *Lwa* (juga dikenal sebagai *mystères* atau *invisibles*). *Lwa* bertindak sebagai perantara antara manusia dan Bondye, serta mengurus berbagai aspek alam dan kehidupan manusia, seperti cinta, pertanian, atau kematian. Setiap *Lwa* memiliki kepribadian, lagu, tarian, dan simbol uniknya sendiri.
- Dua dunia: Vodou mengajarkan bahwa ada dua dunia yang terhubung: dunia yang terlihat (dunia fisik) dan dunia yang tidak terlihat (dunia roh). Manusia adalah roh yang menghuni dunia terlihat, dan setelah meninggal, roh mereka tetap ada di dunia tak terlihat bersama para leluhur dan *Lwa*, mengawasi dan menginspirasi yang hidup.
- Pemujaan Leluhur: Penghormatan terhadap roh leluhur yang telah meninggal adalah aspek fundamental dari Vodou.
- Sinkretisme: Vodou adalah agama sinkretis yang menggabungkan tradisi animisme Afrika Barat (terutama dari kerajaan Dahomey, yang sekarang menjadi Benin) dengan unsur-unsur Katolik Roma, yang dipaksakan pada budak-budak Afrika oleh penjajah Prancis. Banyak *Lwa* disamakan dengan orang suci Katolik.
- *Serving the spirits*: Tujuan utama praktik Vodou adalah "melayani roh" (*sevi lwa*) melalui doa, nyanyian, tarian, dan persembahan untuk menjaga keseimbangan dan energi dalam hubungan antara manusia dan roh, demi kesehatan dan perlindungan.
- Kerasukan Roh: Selama upacara keagamaan, penganut (dipimpin oleh pendeta pria (*oungan*) atau pendeta wanita (*manbo*)) dapat memasuki kondisi trans di mana mereka "dirasuki" atau "ditunggangi" oleh *Lwa*, yang memungkinkan komunikasi langsung dan bimbingan spiritual.

Penting untuk dicatat bahwa Vodou sering disalahpahami dan digambarkan secara tidak akurat oleh media Barat, yang mengasosiasikannya dengan sihir hitam, boneka voodoo yang ditusuk jarum, atau zombi. Pada kenyataannya, Vodou adalah agama yang kaya secara

budaya, berorientasi pada komunitas, dan berfokus pada kehidupan yang mempromosikan keharmonisan sosial dan rasa kebersamaan di antara para penganutnya.

Agama Lainnya:

- Islam, Yahudi, dan agama-agama lain juga ada tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil.

Disimpulkan budaya Voodoo ribuan tahun adalah agama utama “berbaju kristen” menyebabkan 10 perintah Allah berbasis kasih tidak membudaya.

Catatan Penting:

- Konstitusi Haiti menjamin kebebasan beragama, dan negara tidak memiliki agama resmi.
- Praktik Vodou sering kali tersembunyi karena stigma, tetapi memiliki peran penting dalam budaya dan spiritualitas Haiti.

Indeks Kepailitan Negara. Peringkat kredit dari lembaga utama seperti S&P Global, Moody's, dan Fitch menempatkan Haiti dalam *kategori spekulatif*, yang mengindikasikan *kemungkinan gagal bayar (default) yang signifikan atas kewajiban utang komersialnya*.

Peringkat dan Indeks Terkait Haiti

- Peringkat Kredit: Berdasarkan data yang tersedia, Haiti berada pada peringkat kredit 15.00 (*berada dalam kategori spekulatif atau junk*), yang menunjukkan risiko kredit yang sangat tinggi bagi investor swasta. Peringkat yang rendah ini mencerminkan ketidakmampuan dan keengganan untuk membayar kembali utang komersialnya secara penuh dan tepat waktu.
- Indeks Negara Rapuh (Fragile State Index): *Pada tahun 2024, Haiti mencatat skor 103,5 poin dalam Indeks Negara Rapuh (dari skala 0 hingga 120, dengan skor tinggi menunjukkan kerapuhan yang lebih besar), jauh di atas rata-rata dunia sebesar 64,56 poin.* Skor ini menyoroti kerentanan negara yang ekstrem terhadap tekanan politik, sosial, dan ekonomi.
- Kondisi Ekonomi: *Situasi ekonomi Haiti sangat lemah, ditandai dengan kontraksi PDB yang diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 karena ketidakamanan, kekerasan geng, dan ketidakpastian politik.* Inflasi tetap tinggi, terutama inflasi pangan, dan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Secara keseluruhan, meskipun tidak ada satu "indeks kepailitan" tunggal, berbagai peringkat kredit dan indikator ekonomi menunjukkan bahwa Haiti menghadapi risiko gagal bayar yang substansial dan berada dalam kondisi kerapuhan negara yang parah.

Indeks budaya bangsa. Tidak ada satu pun "indeks" tunggal yang merangkum budaya Haiti secara kuantitatif, budaya Haiti adalah perpaduan dari tradisi Afrika, Prancis, Spanyol, dan pribumi Taíno. Pengaruh-pengaruh ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan di Haiti.

Komponen Utama Budaya Haiti

- Bahasa: Dua bahasa resmi adalah Kreol Haiti dan Prancis. Bahasa Kreol Haiti, yang sebagian besar berbasis dari bahasa Prancis dengan pengaruh bahasa Afrika, digunakan secara luas oleh populasi.
- Demografi dan Etnis: Sekitar *95% populasi Haiti berasal dari keturunan Afrika*, keturunan dari budak yang dibawa ke pulau itu, dengan 5% sisanya merupakan campuran atau berkulit putih.
- Agama: Mayoritas penduduk Haiti beragama Kristen, terutama Katolik Roma. Namun, dalam praktiknya, agama sering kali bercampur secara mendalam melalui sinkretisme dengan Vodou Haiti. Vodou Haiti sendiri berakar dari tradisi Afrika ribuan-tahun dan

sangat erat kaitannya dengan sejarah dan identitas budaya Haiti.

- Seni dan Sastra: Budaya Haiti memiliki *tradisi-seni ke-Afirka-an dan sastra yang hidup dan diakui secara internasional*. Seni lukis Haiti, yang sering kali menampilkan hubungan antara kemanusiaan, alam, dan spiritualitas, sangat populer, dan negara ini memiliki penulis-penulis pemenang penghargaan.
- Cerita Rakyat dan Mitologi: Haiti dikenal dengan tradisi cerita rakyatnya yang kaya, sering kali mencakup kisah-kisah magis yang merupakan bagian integral dari tradisi Vodou.
- Sejarah: Warisan sejarah Haiti sebagai negara merdeka pertama di Amerika Latin dan Karibia yang membebaskan diri melalui pemberontakan budak yang sukses sangat membentuk identitas budayanya.

Status di UNESCO. Haiti adalah anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dan berpartisipasi dalam program-program warisan budaya tak benda. Negara ini telah menerima bantuan keuangan dan berkomitmen untuk memperkuat kapasitas institusionalnya untuk menjaga warisan budayanya yang hidup.

Indeks demokrasi. *Haiti menunjukkan skor demokrasi yang sangat rendah dan sering dikategorikan sebagai rezim otoriter atau hibrida, berada di peringkat bawah indeks global seperti Indeks Demokrasi EIU (Economist Intelligence Unit) dan V-Dem (Varieties of Democracy), terutama karena ketidakstabilan politik, korupsi parah, lemahnya lembaga, dan krisis kemanusiaan. Negara ini tergolong dalam 25% terbawah negara dalam banyak metrik, dengan lembaga legislatif tidak berfungsi dan kebebasan sipil terancam, menggarisbawahi tantangan demokrasi yang signifikan.*

Temuan Kunci tentang Demokrasi Haiti:

- Kategori Rezim: Dinilai sebagai "rezim otoriter" pada tahun 2022 oleh EIU.
- Peringkat Rendah: Berada di peringkat bawah dalam indeks global seperti Legatum Prosperity Index (peringkat 156 pada 2023) dan secara konsisten menilai buruk dalam metrik demokrasi elektoral.
- Kelemahan Utama:
  - Lembaga Legislatif: Tidak berfungsi, menyebabkan penurunan signifikan dalam representasi dan akses keadilan.
  - Korupsi: Merajalela dan dianggap salah satu yang terburuk di dunia.
  - Keamanan & Politik: Ketidakstabilan kronis, kekerasan geng, dan krisis kemanusiaan yang parah.
- Area Perbaikan (Terbatas): Beberapa laporan mencatat sedikit kemajuan dalam pengurangan korupsi atau peningkatan pada kategori tertentu (seperti anti-korupsi), yang tidak cukup untuk mengubah status nir-demokrasi secara keseluruhan.

*Secara keseluruhan, indeks demokrasi Haiti dalam junta-militer mencerminkan kondisi demokrasi yang sangat-buruk dan rentan, didominasi oleh hambatan/ tantangan struktural kelembagaan nan-buruk dan krisis terus-menerus.*

Indeks pendidikan. *Indeks pendidikan Haiti sangat rendah, ditandai dengan tingkat melek huruf di bawah 50% (satu-satunya di Amerika), mayoritas sekolah swasta (80%+), pengeluaran publik sangat minim (% PDB rendah), dan tingkat putus sekolah tinggi, dengan tantangan besar akibat kemiskinan, ketidakstabilan, dan sistem yang minim dana, meskipun ada upaya reformasi.*

Indikator Kunci:

- Tingkat Melek Huruf: Di bawah 50% untuk orang dewasa (terendah di Amerika) dan di

bawah 80% untuk kaum muda.

- Partisipasi Pendidikan: Sekitar 50% anak tidak sekolah dasar, 80% gagal mencapai sekolah menengah, dan 80% anak putus sekolah sudah terlalu tua.
- Sistem Pendidikan: Sangat terprivatisasi (80%+ sekolah non-publik) dan kurang dana publik; sistem publik hampir tidak ada (tidak ada sekolah gratis).
- Pengeluaran Publik: Sangat rendah, sekitar 1,27% dari PDB pada tahun 2022.
- Indeks Modal Manusia (Bank Dunia 2020): Anak diperkirakan menyelesaikan 11.4 tahun sekolah (jika mulai usia 4 tahun).

Faktor Penghambat:

- Bangsa tak memiliki budaya belajar.
- Kemiskinan & Ketidakstabilan: Penyebab utama kurangnya akses pendidikan dan tingginya angka putus sekolah.
- Kualitas Rendah: Sistem publik kekurangan dana, memaksa sektor swasta mengambil alih, namun kualitas tetap rendah dan tidak merata.

Secara keseluruhan, pendidikan di Haiti menghadapi krisis parah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi ekstrem, menjadikan akses pendidikan berkualitas sulit dijangkau sebagian besar penduduk.

Indeks pengangguran.

Apabila batas atau lampu merah adalah 6 %, dan batas 10 % batas negara dalam bahaya, Indeks pengangguran Haiti pada tahun 2024 berada di sekitar 15%, meningkat sedikit dari tahun 2023, menjadikannya level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan proyeksi untuk akhir 2025 diperkirakan sekitar 14.8%. Data ini menunjukkan fluktuasi historis, dengan rata-rata historis sekitar 12.58% dan puncak di tahun 1988.

- 2024: Sekitar 15.1% (Trading Economics) / 15.06% (Statista).
- 2023: 14.9%.
- Proyeksi 2025: Sekitar 14.8%.
- Tren: Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak stabil, dengan puncak tertinggi 23.9% pada 1988.

Indeks PDB Perkapita. *PDB per kapita Haiti rendah dan menunjukkan tren penurunan* dan tetap sangat rendah, dengan data terbaru menunjukkan angka sekitar \$ 1.154,87 USD pada tahun 2024, menjadikan Haiti salah satu yang terendah di dunia, meskipun ada fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya seperti puncaknya tahun 1980 (\$2.146,49 USD) dan sempat naik di 2021 (\$1.835 USD) sebelum kembali turun akibat ketidakstabilan politik dan keamanan.

Angka-angka Penting:

- 2024 (Terbaru): \$1.154,87 USD (terendah dalam data historis).
- 2021: \$1.835 USD (sempat naik).
- 1980 (Tertinggi): \$2.146,49 USD.
- Rata-rata (1960-2024): \$1.541,42 USD.

Konteks:

- Ekonomi Haiti terus terhambat ketidak-mampuan birokrasi pemerintahan-militer, ketidakstabilan politik, kekerasan, dan kerawanan, menjadikannya negara termiskin di kawasan Amerika Latin.
- *PDB per kapita Haiti hanya sekitar 9% dari rata-rata PDB perkapita dunia, menunjukkan tingkat kemiskinan yang ekstrem.*

Indeks Kesetaraan gender. Haiti menghadapi tantangan kesetaraan gender yang signifikan, ditunjukkan oleh peringkat rendah dalam *Indeks Ketimpangan Gender (GII) UNDP (163 dari 170 negara pada 2021)*, kesenjangan upah besar (perempuan mendapat 32% lebih

sedikit), tingkat pengangguran perempuan yang lebih tinggi, serta dominasi perempuan di sektor informal dan risiko kekerasan berbasis gender (KBG) yang ekstrem, yang semuanya mencerminkan ketidaksetaraan struktural meskipun ada hukum yang menjamin hak yang sama.

- *Peringkat Global: Haiti berada di peringkat 163 dari 170 negara dalam GII UNDP tahun 2021, menunjukkan ketidaksetaraan gender yang sangat tinggi.*
- *Kesenjangan Upah & Pekerjaan: Perempuan di Haiti mengalami kesenjangan upah terbesar di antara negara-negara Afrika dan Amerika Latin, dengan gaji rata-rata 32% lebih rendah dari laki-laki, serta tingkat pengangguran yang lebih tinggi, terutama di sektor informal.*
- *Akses Sumber Daya: Akses perempuan terhadap lahan/properti dan keuangan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (hanya 8% perempuan pedesaan memiliki lahan vs 20% laki-laki).*
- *Kesehatan Reproduksi: Tingkat kehamilan remaja tergolong tinggi, mencerminkan kurangnya kontrol perempuan terhadap hubungan-bebas kesehatan seksual mereka.*
- *Kekerasan Berbasis Gender (KBG): KBG, terutama kekerasan seksual, meningkat dan digunakan sebagai alat intimidasi serta kontrol, diperburuk oleh ketidakstabilan politik dan keamanan.*
- *Situasi Kemanusiaan: Krisis keamanan menyebabkan perempuan dan anak perempuan sangat rentan, menjadi mayoritas pengungsi dan menghadapi risiko kekerasan ekstrem di kamp-kamp darurat.*

## Kesimpulan

Budaya ribuan tahun patriarkis berwarna kekerasan-gender di atas hukum positif, budaya Afrika ribuan tahun mengatasi hukum agama Katolik, dan pemerintahan militer menjadi penyebab kabinet tak berdaya saing global. Meskipun Haiti memiliki undang-undang yang menjamin kesetaraan gender, realitas di lapangan jauh berbeda karena masalah struktural, pandangan patriarki yang mengakar, kemiskinan, dan krisis keamanan yang memperburuk ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja, akses sumber daya, kesehatan, serta keamanan pribadi perempuan.

## Guinea-Bissau

### Konstitusi

Konstitusi Guinea-Bissau, yang diadopsi tahun 1984 dan diamandemen beberapa kali (terakhir 1996), menetapkan negara ini sebagai republik demokratis semi-presidensial dengan sistem multi-partai, di mana Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah, namun negara sering dilanda ketidakstabilan politik dan intervensi militer meskipun ada demokrasi yang diamanatkan konstitusi. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat, pemisahan agama dan negara, serta hak asasi manusia, dengan lembaga legislatif unikameral (Majelis Rakyat Nasional).

### Agama utama

Agama utama di Guinea-Bissau adalah Islam, diikuti oleh Kristen dan kepercayaan tradisional Afrika (animisme), dengan persentase yang bervariasi tergantung sumber, namun Islam adalah mayoritas dengan sekitar 45-50%, diikuti Kristen sekitar 20-30%, dan praktik-adat ribuan-tahun sekitar 15-30%. Banyak penduduk mempraktikkan sinkretisme, menggabungkan unsur-unsur agama formal dengan kepercayaan tradisional leluhur dan animisme, terutama di kalangan Muslim dan Kristen.

## Indeks Kepailitan Negara

Negara menghadapi risiko tinggi kesulitan utang (high risk of debt distress), analisis keberlanjutan utang (Debt Sustainability Analysis/DSA) dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia secara konsisten mengklasifikasikan *risiko utang luar negeri dan keseluruhan negara ini sebagai tinggi*, rasio utang publik terhadap PDB diperkirakan menurun menjadi 78,5% pada tahun 2025 (dari sekitar 80,3% pada tahun 2024), risikonya tetap tinggi.

- Ekonomi sangat bergantung hanya pada ekspor kacang mete, yang menyumbang hampir 70% lapangan kerja dan 95% ekspor. Ketergantungan ini membuat negara rentan terhadap gejolak harga pasar global dan kondisi cuaca.
- Ketidakstabilan politik kronis sejak kemerdekaan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan.
- Ketidakpastian politik selalu menjadi risiko signifikan terhadap prospek ekonomi. Guinea-Bissau termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar populasi hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.
- Agen pemeringkat kredit utama tidak secara luas memberikan peringkat untuk Guinea-Bissau, tetapi data yang tersedia menunjukkan penyebaran *default* yang disesuaikan (Adjusted Default Spread) sebesar 6,44%, yang mencerminkan kelemahan ekonomi.

## Indeks budaya bangsa.

### Seni:

- Ekspresi seni tradisional yang kaya, termasuk ukiran, tekstil, dan kerajinan tangan lainnya yang mencerminkan mitologi dan kehidupan sehari-hari..
- Negara ini berada di peringkat ke-158 dari 180 negara dengan skor hanya 21 dari skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), dan korupsi disebut sebagai karakteristik dari pemerintahan dan ekonomi.
- Indeks keragaman etnis dan agama yang tinggi, tingkat percampuran keyakinan amat besar, tingkat pembangunan SDM yang rendah dibandingkan rata-rata dunia.

### Indeks demokrasi.

- *Indeks demokrasi Guinea-Bissau rendah dan menurun, dikategorikan sebagai negara rezim hibrida dengan isu ketidakstabilan politik, korupsi, dan lemahnya supremasi hukum*, meskipun ada sedikit perbaikan kebebasan sipil pasca-kudeta, namun negara ini masih menghadapi tantangan serius dalam proses elektoral/pemilu dan fungsi pemerintahan yang efektif, menempatkannya di bawah rata-rata global dalam berbagai indikator demokrasi.
- The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index (2024): Mencapai 2.03 poin (dari skala 10), menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, menempatkannya di kategori rezim hibrida (negara dengan *pemilu curang dan kebebasan sipil terbatas*). International IDEA (Global State of Democracy) menunjukkan kinerja rendah dalam Representasi, Hak, dan Aturan Hukum, serta penurunan tajam dalam Pemilu yang Kredibel dan Pemerintahan Terpilih, meskipun partisipasi politiknya di kisaran menengah.
- Freedom House (2023), menyebutkan *ketidakstabilan politik dan korupsi sebagai masalah utama kegagalan berbangsa-bernegara*, meskipun ada perbaikan bertahap dalam kebebasan sipil setelah kudeta 2012.
- Ketidakstabilan Politik: Sering terjadi perpecahan antara presiden dan parlemen, serta di dalam partai politik.
- Korupsi & Kejahatan Terorganisasi: *Masalah korupsi merajalela, diperparah oleh*

*aktivitas perdagangan narkoba.*

- Fungsi Pemerintahan: *Pemerintahan tidak (selalu) berfungsi efektif, dengan isu di lembaga peradilan dan lemahnya supremasi hukum.*
- *Kebebasan Sipil: Terbatas, tak ada iklim demokrasi, dengan tekanan penguasa pada media dan oposisi politik.*

Secara keseluruhan, Guinea-Bissau berjuang melawan ketidakstabilan politik kronis dan tantangan ekonomi, dan masih gagal, yang berdampak signifikan pada indikator demokrasinya, menjadikannya contoh rezim hibrida yang sedang berjuang untuk membangun institusi demokrasi yang kuat dan stabil namun-gagal.

Indeks pendidikan.

- *Indeks pendidikan Guinea-Bissau tergolong rendah, ditandai tingkat partisipasi sekolah dasar yang rendah (sekitar 55%), kelulusan SD yang rendah (27,2% pada 2019), dan tantangan akses bagi anak perempuan dan penyandang disabilitas akibat infrastruktur buruk, kurangnya guru terlatih, serta masalah sosial-budaya.*
- *Meskipun pendidikan wajib 7-14 tahun, banyak anak tidak sekolah atau putus dini, "kemiskinan pembelajaran" tinggi dan kesenjangan gender yang signifikan di pendidikan menengah, meskipun ada perbaikan di tingkat sekolah dasar.*

Tantangan Utama

- *Akses dan Partisipasi: Hanya sekitar 55% anak yang mengikuti pendidikan dasar, 45 % tidak pernah sekolah atau putus dini, terutama di pedesaan.*
- *Kualitas: Amat buruk, sekolah sering kekurangan guru terlatih, fasilitas sanitasi tidak memadai, dan kurikulum lengkap tidak tersedia, yang menyebabkan "krisis pembelajaran" bangsa.*
- *Kesenjangan Gender: Meskipun ada paritas gender di SD, kesenjangan muncul di SMP, dengan lebih banyak anak laki-laki bersekolah, dipengaruhi norma budaya patriarkhis, jarak sekolah, dan sanitasi.*
- *Anak Penyandang Disabilitas: Mengalami hambatan besar karena kurangnya infrastruktur bagi kelompok dis-abil dan pelatihan guru.*
- *Data dan Statistik: Terdapat kesenjangan data, namun menunjukkan tingkat putus sekolah dini yang tinggi dan penurunan kesenjangan gender saat transisi ke pendidikan menengah.*

Indikator Kunci (Data Terbaru/Terkait)

- *Tingkat Kelulusan SD: 27.2% (2019).*
- *Rasio Partisipasi Kasar (Dasar): 118.7% (2019).*
- *Lama Sekolah (Rata-rata, 2019): 8.08 tahun (usia 20-24).*
- *Indeks Ketimpangan Gender (2021): 0.627 (sangat rendah).*
- *Peringkat (Legatum Prosperity Index 2023): 149.*

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Guinea-Bissau menghadapi hambatan/tantangan besar dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas dan merata, meskipun ada upaya perbaikan di beberapa area.

Indeks pengangguran.

- *Terdapat banyak pekerja tak-berbayar. Indeks pengangguran di Guinea-Bissau relatif rendah, dengan data terbaru (Desember 2024) menunjukkan tingkat pengangguran sekitar 2,6%, yang juga merupakan angka yang diproyeksikan untuk tahun 2024 dan 2025 (meskipun ada sedikit variasi antara sumber, umumnya sekitar 2.6% - 2.8%). Angka ini menempatkannya dalam kategori tingkat pengangguran yang rendah secara global dan di Afrika.*

#### Data Kunci:

- Tingkat Pengangguran Terkini: 2.6% (Desember 2024).
- Tren: Tingkat pengangguran menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya (misalnya, 2.67% pada 2022 dan 3.03% pada 2021).
- Periode Data: Angka 2.6% dari Trading Economics diperbarui per Desember 2024, dan angka 2.62% dari Macrotrends adalah untuk tahun 2024.

Secara keseluruhan, Guinea-Bissau menunjukkan tingkat pengangguran yang stabil namun rendah dibandingkan banyak negara lain, tak berpengaruh pada pDB atau PDB perkapita karena nilai-ekonomi produktivitas-perkapita amat-rendah, merupakan anomali negara *full-employment* termiskin di dunia, dengan tantangan-berat pembangunan-ekonomi.

#### Indeks PDB Perkapita.

- PDB per kapita Guinea-Bissau sangat rendah, berada di antara negara termiskin di dunia, dengan data terbaru (sekitar 2024) menunjukkan angka nominal sekitar \$584 - \$786 USD (Trading Economics) atau sekitar \$900 USD (Macrotrends 2021), sementara jika disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (PPP) mencapai sekitar \$2.685 USD (PPP 2024) yang setara 15% dari rata-rata dunia, menunjukkan daya beli relatif lebih baik dari nilai nominalnya, namun tetap rendah. Sebab utama adalah bahwa ekonomi negara ini sangat bergantung pada pertanian (kacang mete) dan bantuan luar negeri, dengan ketidakstabilan politik menghambat pertumbuhan.

#### Data PDB Per Kapita Guinea-Bissau (Perkiraan 2024-2025):

- Nominal (USD): Sekitar \$584 - \$786 (rata-rata historis dan tertinggi 2024).
- PPP (USD): Mencapai \$2.685 (2024), setara 15% rata-rata dunia.
- Peringkat: Termasuk negara termiskin di dunia.

#### Konteks Ekonomi:

- Ketergantungan: Sektor pertanian sempit (kacang mete) dan bantuan asing.
- Tantangan: Ketidakstabilan politik kronis, kemiskinan yang tinggi (lebih dari 40% penduduk miskin), dan keterbatasan sumber daya.

#### Indeks Kesetaraan gender.

- Guinea-Bissau menghadapi hambatan/tantangan kesetaraan gender signifikan, ditunjukkan oleh ketimpangan dalam literasi (perempuan jauh tertinggal), partisipasi politik (persentase kursi parlemen rendah), kesehatan reproduksi (tingkat kehamilan remaja tinggi), dan kekerasan berbasis gender, meskipun ada upaya dari organisasi perempuan dan legislasi seperti Undang-Undang Paritas (2018) yang tidak efektif.
- Tidak ada satu angka "indeks" tunggal yang bisa disebutkan, tetapi data dari UN Women, World Bank, dan UNDP menggarisbawahi *kesenjangan besar dalam pendidikan, perwakilan politik, dan hak-hak perempuan lainnya*.

Indikator Kunci Ketimpangan Gender di Guinea-Bissau, adalah akar utama kemiskinan bangsa:

- Sekitar 50 % SDM bangsa cq penduduk perempuan tak digunakan untuk pembangunan ekonomi karena gender-apartheid.
- Pendidikan: Tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki.
- Politik: Perempuan memegang persentase kursi yang sangat kecil di parlemen nasional (sekitar 9.8%).
- Kesehatan & Hak Reproduksi: Tingkat kehamilan remaja sangat tinggi (84.5 per 1000 usia 15-19), dan banyak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (25.7%).
- Kekerasan: Terdapat banyak insiden kekerasan dalam rumah tangga dan mutilasi genital perempuan (FGM) yang tinggi.

- Ekonomi: Kesenjangan signifikan dalam pekerjaan domestik tak berbayar, kesenjangan upah, dan akses terbatas ke lahan serta kredit.

Upaya dan Hambatan:

- Pendorong Perubahan: Budaya represif berbasis gender ribuan-tahun adalah sebab utama negara gagal. Ada pertumbuhan organisasi perempuan dan jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan partisipasi politik, serta mendorong legislasi seperti "Undang-Undang Paritas" (Parity Law) tahun 2018, tak sanggup melawan budaya-represif gender ribuan-tahun, sehingga tak berjalan efektif.
- Hambatan: Stabilitas politik nir-demokratis yang kronis, struktur pemerintahan tidak-profesional nan-rapuh, serta norma sosio-kultural patriarki memperburuk diskriminasi dan eksklusi perempuan.

Secara keseluruhan, Guinea-Bissau masih berjuang untuk membangun iklim demokrasi cq mencapai kesetaraan gender, dengan banyak area yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam data dan implementasi kebijakan.

## Liberia

### Konstitusi

Konstitusi Liberia saat ini adalah Konstitusi 1986, yang merupakan hukum tertinggi negara, mengadopsi sistem republik dengan pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) mirip AS, menjamin hak-hak fundamental, dan menetapkan Presiden sebagai kepala negara/pemerintahan yang dipilih langsung.

Konstitusi ini menggantikan Konstitusi 1847 dan menekankan kesetaraan, kebebasan berekspresi, serta menetapkan bahwa hanya orang Negro atau keturunan Negro yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Liberia.

- Bentuk Negara: Republik kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan tiga cabang kekuasaan yang terpisah (legislatif, eksekutif, yudikatif).
- Hukum Tertinggi: Menjadi hukum fundamental yang mengikat semua otoritas dan individu.
- Hak Warga Negara: Melindungi hak-hak fundamental seperti kebebasan berpikir, berekspresi, bergerak, kesetaraan, dan larangan diskriminasi, sesuai Bab III.
- Kewarganegaraan: Terbatas untuk orang Negro atau keturunan Negro; kewarganegaraan ganda tidak diakui setelah dewasa (kecuali anak-anak).
- Badan Legislatif: Bikameral, terdiri dari Senat (masa jabatan 9 tahun) dan Dewan Perwakilan Rakyat (6 tahun).
- Presiden: Kepala negara dan pemerintahan, dipilih langsung untuk masa jabatan 6 tahun, memiliki kekebalan hukum selama menjabat (kecuali untuk pemakzulan).
- Pemisahan Kekuasaan: Menerapkan prinsip *checks and balances* antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Perjanjian Internasional: Presiden dapat membuat perjanjian dengan persetujuan legislatif.

### Sejarah Singkat

- Konstitusi 1847: Konstitusi pertama Liberia, berlaku sejak kemerdekaan hingga **ditangguhkan** pada tahun 1980.
- Konstitusi 1986: Diadopsi melalui referendum 1984, mulai berlaku pada 6 Januari 1986, dan menjadi konstitusi saat ini.

### Agama utama

- Agama utama di Liberia adalah Kekristenan, yang dianut oleh mayoritas penduduk

(sekitar 85,5%), dengan Protestan menjadi denominasi terbesar, Islam adalah agama terbesar kedua (sekitar 12,2%), dan agama tradisional Afrika juga dipraktikkan oleh sebagian kecil penduduk, meskipun Liberia adalah negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama.

- Konstitusi Liberia menjamin kebebasan beragama, tetapi secara praktik dianggap sebagai negara Kristen, dengan acara pemerintahan sering dimulai dengan doa Kristen. Sinkretisme; kepercayaan tradisional seringkali terintegrasi ke dalam teologi Kristen dan Islam di Liberia.

#### Indeks Kepailitan Negara.

- Analisis keberlanjutan utang bersama oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa Liberia berada pada risiko sedang mengalami distress utang eksternal (kesulitan membayar utang luar negeri).
- Peringkat kapasitas menanggung utang Liberia dinilai lemah.
- Bank Dunia mencatat bahwa Liberia telah mencapai stabilisasi makroekonomi yang "patut dipuji" setelah pulih dari perang saudara, namun masih menghadapi kendala struktural birokrasi yang mendalam yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Liberia menempati peringkat ke-154 dari 184 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2025 dan peringkat ke-112 dari 140 negara dalam Indeks Aturan Hukum global, menunjukkan tantangan dalam tata kelola dan lingkungan investasi.
- Secara ringkas, Liberia tidak dinyatakan "pailit" atau gagal bayar (default) secara resmi, tetapi menghadapi kerentanan ekonomi yang signifikan dan dikategorikan memiliki risiko sedang terhadap kesulitan utang oleh lembaga keuangan global.

#### Indeks budaya bangsa

- Budaya Liberia adalah perpaduan unik antara tradisi Afrika asli yang kaya dengan pengaruh Amerika yang berasal dari para budak yang dibebaskan, ditandai dengan keragaman etnis, bahasa (Inggris resmi, banyak bahasa lokal), agama (mayoritas Kristen), seni (topeng kayu, musik tradisional dan modern), serta simbolisme nasional yang mencerminkan sejarah uniknya sebagai "tanah kebebasan".
- Meskipun kota-kota cenderung lebih mengadopsi adat Barat, musik dan kerajinan tradisional tetap vital, dengan nilai-nilai seperti kebebasan dan nilai-nilai keluarga yang kuat.

#### Elemen Budaya Utama

- Etnis & Bahasa: Lebih dari 20 kelompok etnis (Kpelle, Bassa, Gio, Mano, dll.), Bahasa Inggris adalah bahasa resmi, tetapi ada "Bahasa Inggris Liberia" (Kreol) dan banyak bahasa lokal (Bassa, Dan, Kpelleh).
- Agama: Mayoritas Kristen (Protestan dominan), dengan minoritas Muslim yang signifikan (kelompok Mandingo dan Vai).
- Seni & Musik: Topeng ukir kayu, patung kayu, musik tradisional (untuk pernikahan, duka) dan musik Kristen yang dipengaruhi gaya Afrika, serta musik Barat modern.
- Simbolisme: Bendera mirip AS, lambang dengan kapal layar (membawa pemukim), pohon palem, bajak, kapak, dan moto "Cinta Kebebasan Membawa Kita ke Sini".
- Sejarah & Identitas: Berasal dari pemukim budak Amerika, menciptakan identitas unik "tanah kebebasan" (nama Liberia), yang tercermin dalam simbol dan struktur awal negara.

#### Karakteristik Sosial

- Perkotaan vs. Pedesaan: Adat Barat lebih umum di kota, sementara adat asli kuat di pedesaan.
- Pendidikan & Bahasa: Pria sering lebih fasih dalam Inggris standar karena akses

pendidikan lebih baik; wanita lebih kuat dalam Kreol Liberia.

#### Tantangan & Modernisasi

- Meskipun kaya sumber daya, Liberia menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan institusi yang rapuh pasca-perang sipil, memengaruhi kehidupan sehari-hari dan modernisasi budaya.

#### Indeks demokrasi.

- Liberia rendah, dikategorikan sebagai "rezim hibrida" dalam indeks demokrasi, bukan demokrasi penuh atau otoritarianisme, dengan skor yang menunjukkan peningkatan sedikit (naik 0.14) mencapai 5.57 pada tahun terbaru (kemungkinan 2023/2024), menempatkannya di peringkat 79 dalam peringkat Global Democracy Index (Indeks Demokrasi Global).
- Meskipun memiliki elemen demokrasi seperti pemilihan umum, negara ini tak memiliki kebebasan sipil, supremasi hukum yang lemah, dan korupsi yang menghambat transisi penuh ke sistem yang lebih demokratis.

#### Indeks Demokrasi Liberia (Berdasarkan Data yang Tersedia) nan rendah sbb:

- Kategori: Rezim Hibrida (Hybrid Regime).
- Perubahan Peringkat: Naik 7 peringkat.
- Skor Terbaru: 5.57 (naik 0.14).
- Peringkat Global: 79 dari negara yang diukur.

#### Konteks Demokrasi di Liberia:

- Transisi Demokrasi: Setelah perang saudara, Liberia berusaha membangun kembali institusinya, tetapi fondasi demokrasi masih rapuh/lemah
- Tantangan: Masalah utama adalah korupsi, sistem hukum yang belum efektif, dan hambatan regulasi menghambat kemajuan demokrasi dan kebebasan ekonomi.
- Perbandingan: Meskipun ada kemajuan kecil, Liberia masih di belakang negara-negara Afrika lain yang lebih maju dalam indeks demokrasi seperti Tanjung Verde atau Seychelles.

#### Indeks pendidikan.

- Indeks pendidikan Liberia menunjukkan tantangan signifikan pasca-konflik domestik, dengan tingkat melek huruf dewasa sekitar 48,3% (2022) dan angka partisipasi sekolah yang fluktuatif, meskipun ada peningkatan; data terbaru menunjukkan tantangan dalam fasilitas, kualitas guru, dan akses pendidikan, terutama di tingkat menengah, meskipun upaya peningkatan sedang dilakukan, dengan perhatian khusus pada daerah pedesaan dan kesenjangan gender.

#### Indikator Kunci Pendidikan Liberia:

- Tingkat Melek Huruf: Perkiraan 48,3% (2022), dengan perbedaan signifikan antara laki-laki (48,4%) dan perempuan (24,1%), serta lebih rendah di pedesaan (34%).
- Angka Partisipasi Kasar (APK): Fluktuatif, dengan rata-rata sekitar 57,68% untuk SD dan 23,62% untuk SMP pada periode 2005-2014, namun masih rendah secara keseluruhan.
- Angka Partisipasi Murni (APM): Bahkan lebih rendah, sekitar 25,29% untuk SD dan 10,17% untuk SMP pada periode yang sama, menunjukkan sebagian besar anak usia sekolah resmi tidak terdaftar.
- Durasi Pendidikan: Rata-rata anak menerima 10 tahun pendidikan (laki-laki 11, perempuan 8), dengan akses yang bervariasi dan biaya di beberapa area.
- Kualitas: Sektor pendidikan buruk & rapuh karena konflik sebelumnya, menyebabkan kurangnya fasilitas dan guru berkualitas, meskipun ada sekolah negeri gratis untuk

sekolah-dasar.

- Struktur Pendidikan:
  - Sistem pendidikan mengikuti struktur 3-9-3-4
  - Pendidikan Anak Usia Dini (3 tahun),
  - Pendidikan Dasar (9 tahun - SD 6 tahun + SMP 3 tahun),
  - Pendidikan Menengah/Kejuruan (3 tahun),
  - Pendidikan Tinggi (4 tahun).

Hambatan/Tantangan Utama Tingkat Pendidikan:

- Dampak jangka panjang perang sipil non-kontraproduktif.
- Keterbatasan fasilitas pendidikan dan guru berkualitas.
- Tingkat melek huruf yang rendah, terutama di kalangan perempuan dan pedesaan, menyebabkan daya-saing SDM buruk.
- Kesulitan dalam akses pendidikan menengah dan biaya sekolah.

Indeks pengangguran.

- Tingkat pengangguran di Liberia sangat rendah, dilaporkan sekitar 2.9% pada tahun 2024 (menurut data Desember 2024) dan diprediksi stabil di angka tersebut atau bahkan sedikit turun menjadi sekitar 2.8% pada tahun 2025, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia.
- Tak ada hubungan tingkat pengangguran rendah dengan Pertumbuhan PDB perkapita, karena rerata pendidikan amat rendah.

Data Terbaru (2024-2025)

- Tahun 2024: 2.9%
- Prediksi 2025: 2.8% (diperkirakan)

Konteks Tambahan

- Angka ini stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan signifikan dalam data pengangguran resmi.
- Meskipun demikian, Liberia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam angka pengangguran resmi, seperti kemiskinan di beberapa wilayah dan keterbelakangan ekonomi setelah perang saudara.

PDB Perkapita.

- Karena rerata pendidikan rendah, walau angka pengangguran rendah, maka PDB perkapita rendah. PDB per kapita Liberia berada di kisaran rendah, diproyeksikan sekitar \$904 (nominal) pada 2025 menurut IMF dan \$846,28 (nominal) pada 2024 dari Data Commons, sementara PDB per kapita PPP (Paritas Daya Beli) diperkirakan mencapai sekitar \$1701 pada akhir 2025.
- Liberia adalah negara berpenghasilan rendah dengan ekonomi yang masih berkembang dan menghadapi tantangan struktural pemerintahan, meskipun memiliki sumber daya alam melimpah seperti karet, kayu, dan bijih besi.

Angka PDB per Kapita Terbaru:

- PDB Per Kapita Nominal (2025 estimasi): \$904
- PDB Per Kapita PPP (2025 estimasi): \$1701
- PDB Per Kapita Nominal (2024): \$846,28

Konteks Ekonomi:

- Liberia menduduki peringkat rendah dalam hal kekayaan SDM per kapita dibandingkan negara lain.
- Ekonomi Liberia dianggap "tertekan" dalam konteks Indeks Kebebasan Ekonomi 2025 karena fondasi kebebasan ekonomi yang rapuh dan hambatan regulasi.

Faktor Pendukung & Penghambat:

- Pendukung: Sumber daya alam yang kaya (karet, bijih besi, kayu).
- Penghambat: Tantangan paska-perang saudara adalah kondisi-hukum dan transparansi amat buruk, sistem hukum yang belum efektif, korupsi, dan sektor informal yang besar.

Indeks Kesetaraan gender.

- Perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan kemakmuran.
- Liberia menunjukkan peningkatan dalam kesetaraan gender, dengan skor Global Gender Gap Index mencapai 0.760 pada tahun 2025, tertinggi sejak 2014, meskipun masih menghadapi tantangan signifikan dalam partisipasi ekonomi, pendidikan (terutama pendidikan lanjutan), pemberdayaan politik, dan kekerasan berbasis gender (GBV).
- Diskriminasi gender berbasis budaya patriarkis ribuan-tahun adalah sebab utama kemiskinan bangsa. Data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan dalam kepemilikan aset dan peran tradisional gender, dengan perempuan yang *lebih jarang memiliki akses ke pendidikan lanjutan dan aset* dibandingkan laki-laki.
- Isu hak perempuan yang paling penting di Liberia, banyak warga percaya bahwa GBV sering terjadi dan korban kemungkinan akan dikritik jika melapor, meskipun mayoritas menganggapnya masalah pidana, bukan masalah pribadi.

## Chad

Konstitusi

Konstitusi Chad saat ini adalah Konstitusi 2023 yang disahkan melalui referendum Desember 2023, menggantikan Konstitusi 2018 dan menetapkan Chad sebagai Republik Presidensial yang sekuler dan demokratis, memperkuat peran presiden, dan membentuk parlemen bikameral (Senat dan Majelis Nasional), meskipun negara ini masih dalam masa transisi pasca-kematian Presiden Idriss Déby.

- Bentuk Negara: Republik Presidensial, sekuler, bersatu, dan tak terpisahkan.
- Sistem Pemerintahan: Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, didukung oleh pemerintah.
- Badan Legislatif: Bikameral (dua kamar) sejak 2023, terdiri dari Senat (anggota ditunjuk dan dipilih tidak langsung) dan Majelis Nasional (dipilih langsung).
- Hak dan Kebebasan: Menjamin hak dasar warga negara, meskipun implementasinya sering menjadi masalah.
- Amandemen Terakhir (2023): Mengesahkan konstitusi baru setelah periode transisi militer, mengakhiri jabatan Perdana Menteri, dan menetapkan masa jabatan presiden.

Perkembangan Terbaru:

- Setelah kematian Idriss Déby pada 2021, militer mengambil alih dan membentuk Dewan Militer Transisi. Demokrasi berakhir.
- Konstitusi 2023 diadopsi untuk mengakhiri masa transisi dan membuka jalan bagi pemilihan presiden baru, Mahamat Déby, yang kemudian memperpanjang kekuasaan keluarga Déby, seperti dilaporkan Wikipedia dan International IDEA.

Agama utama.

- Agama utama di Chad adalah Islam (mayoritas di utara dan timur) dan Kristen (dominan di selatan), dengan populasi yang terbagi cukup merata, serta kepercayaan tradisional Afrika juga dipraktikkan, mencerminkan perpaduan budaya yang kaya di negara tersebut.
- Sekitar 50-60% penduduknya Muslim Sunni, sementara sekitar 40% adalah Kristen (Katolik dan Protestan), dan sisanya penganut kepercayaan lokal atau tidak beragama.

### Indeks Kepailitan Negara.

- Chad menghadapi risiko gagal bayar yang tinggi dan telah mencari bantuan utang internasional.
- Peringkat Kredit: Pada Oktober 2024, S&P Global Ratings memberikan peringkat 'B-/B' untuk Chad, yang mengindikasikan risiko kredit yang signifikan gawatnya (kategori negara non-investasi). Peringkat ini mencerminkan kemungkinan bahwa peminjam (dalam hal ini, pemerintah Chad) mungkin tidak memenuhi kewajiban utangnya.
- Analisis Keberlanjutan Utang: Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) secara rutin melakukan analisis keberlanjutan utang ( *Debt Sustainability Analysis* ) untuk Chad. Laporan tahun 2024 menggarisbawahi kerentanan utang negara tersebut.
- Permohonan Bantuan Utang: Pada April 2021, Chad secara resmi meminta perlakuan utang ( *debt treatment* ) di bawah "Kerangka Kerja Umum G20 untuk Perlakuan Utang di Luar DSSI" ( *G20 Common Framework* ). Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius tentang ketidak-kemampuan negara tersebut untuk membayar kembali utangnya.
- Kondisi Ekonomi: Chad tetap menjadi salah satu negara paling terbelakang di dunia, dengan *tingkat kemiskinan yang tinggi (44,8% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2022)*.
- Ekonomi sangat bergantung pada sektor minyak, yang rentan terhadap volatilitas harga global.

Secara keseluruhan, meskipun Chad belum dinyatakan "pailit" secara formal, negara ini berada posisi rentan-kemampuan membayar utang luar negeri.

### Indeks budaya bangsa.

#### Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 dari Transparency International.

- Kita sama mafhum, sulit mengubah budaya tidak-jujur ribuan tahun. Skor: Chad memperoleh skor 21 dari 100 (di mana 0 sangat korup dan 100 sangat bersih). Rata-rata sub-Sahara Afrika adalah 33.
- Peringkat: Chad menempati peringkat 158 dari 180 negara dalam indeks tersebut.
- Karakteristik: Korupsi ditandai oleh nepotisme, kronisme, dan impunitas bagi pejabat pemerintah, dengan sistem peradilan yang sangat dipengaruhi oleh eksekutif.

#### Kekerasan dan Konflik.

- Kita sama mafhum, sulit mengubah budaya gemar-berkonflik ribuan tahun. Negara ini mengalami berbagai bentuk konflik kekerasan, baik internal maupun terkait ketidakstabilan regional.
- Konflik Internal: Bentrokan mematikan terjadi berulang kali terjadi antara penggembala dan petani, terutama di wilayah selatan dan timur, yang dipicu oleh tekanan perubahan iklim, tekanan demografis, dan persaingan sumber daya alam. Bentrokan semacam ini menewaskan puluhan orang setiap tahunnya, dengan peningkatan jumlah korban jiwa dan pengungsian internal yang signifikan pada tahun 2024 dan 2025.
- Sulit menghapus budaya anarkis suka-bertengkar ribuan tahun. Pemberontakan dan Terorisme: Kelompok bersenjata, termasuk yang terkait dengan Boko Haram dan kelompok pemberontak lainnya (seperti FACT), aktif di wilayah perbatasan dan utara, menciptakan situasi keamanan yang tidak menentu.
- Ketidakstabilan Regional: Konflik di negara tetangga, terutama Sudan, dapat meluas ke Chad, dengan pergerakan kelompok bersenjata melintasi perbatasan.

#### Indeks Perdamaian Global

- Sebagai bangsa rusuh-batin nir-kedamaian kalbu, dalam Global Peace Index (GPI) 2025, Chad berada di peringkat bawah secara global dan regional, menunjukkan tingkat

perdamaian yang rendah. Chad berada di peringkat sekitar 134 dari 163 negara dalam GPI 2025, menyoroti lingkungan keamanan yang rapuh dan tingkat kekerasan yang tinggi.

#### Indeks good-governance

- Secara keseluruhan, data indeks dan laporan menunjukkan bahwa Chad menghadapi tantangan berat dalam hal tata kelola pemerintahan bersih, korupsi endemik, dan kekerasan yang meluas akibat ketegangan komunal dan aktivitas kelompok bersenjata.

#### Indeks demokrasi.

- Chad memiliki Indeks Demokrasi yang sangat rendah, sering kali termasuk dalam kategori rezim otoriter atau hibrida, dengan skor rendah di berbagai metrik seperti *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dan *International IDEA*, menyoroti masalah seperti ketidakstabilan politik, isu representasi, independensi peradilan yang lemah, dan kemiskinan tinggi yang memengaruhi kebebasan warganya, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat demokrasi terendah di dunia.
- EIU (2023/2024): Dalam daftar 10 negara dengan rezim militer/otoriter terburuk, Chad memiliki skor Indeks Demokrasi 1.67, menempatkannya sangat rendah pada panggung global.
- Sistem peradilan yang buruk. *International IDEA (Global State of Democracy)*: Chad berada di 25% terbawah negara-negara dalam kerangka *Global State of Democracy*, dengan penurunan kinerja di faktor Representasi dan Independensi Peradilan.

#### Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Kinerja Chad:

- Ketidakstabilan Politik: Chad mengalami pergantian pemerintahan *inkonstitusional*.
- Isu Representasi: Kinerja buruk dalam hal representasi dan partisipasi politik.
- Independensi Peradilan: Independensi peradilan yang sangat lemah.
- Korupsi: Tingkat korupsi yang tinggi dan aturan hukum yang rapuh.
- Kondisi Sosial-Ekonomi: Kemiskinan ekstrem, ketidakamanan pangan, dan ketimpangan gender yang tinggi.

Secara keseluruhan, Indeks Demokrasi Chad mencerminkan negara yang sangat terkendala oleh otoritarianisme dan kurangnya kebebasan fundamental bagi warganya, seperti dilaporkan oleh berbagai organisasi pemantau demokrasi.

#### Indeks pendidikan.

- Bangsa yang bodoh bernasib terpuruk. Chad berada pada peringkat yang rendah secara global, dengan angka melek huruf yang sangat rendah dan tingkat partisipasi yang menurun di tingkat yang lebih tinggi.

#### Berikut adalah beberapa indikator utama kualitas pendidikan di Chad:

- Tingkat Melek Huruf: Pada tahun 2022, tingkat melek huruf di Chad adalah sekitar 27,28%, salah satu yang terendah di dunia.
- Angka Partisipasi:
  - Angka partisipasi bruto gabungan untuk pendidikan dasar adalah 88%. Namun, angka ini turun drastis menjadi hanya 29% di tingkat sekolah menengah pertama.
  - Tingkat penyelesaian pendidikan dasar adalah 38%.
- Wajib Belajar: Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun, tetapi penerapannya terkendala oleh berbagai faktor.
- Tantangan Utama:
  - Populasi yang tersebar dan keengganan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

- Konflik dan krisis berkepanjangan yang membebani stabilitas dan keuangan publik, termasuk sistem pendidikan.
- Kesenjangan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur pendidikan, terutama antara perkotaan dan pedesaan.

Organisasi internasional seperti UNICEF Chad dan World Bank Group terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mengatasi krisis pendidikan di negara tersebut dan memperbaiki indikator-indikator ini, dan (masih) gagal.

Indeks pengangguran.

- Tingkat pengangguran terbuka di Chad cukup rendah dan sehat, adalah 0,90% pada tahun 2024. Angka ini menurun dari 1,00% pada tahun sebelumnya.
- Angka pengangguran tak relevan bila nilai-tambah & produktivitas perkapita amat-rendah dan budaya korup.

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai tingkat pengangguran di Chad:

- Data Terbaru: Pada tahun 2024, tingkat pengangguran tercatat sebesar 0,90%.
- Tren Sejarah: Rata-rata tingkat pengangguran di Chad adalah 0,87% dari tahun 1991 hingga 2024.
- Titik Tertinggi dan Terendah: Tingkat pengangguran tertinggi yang pernah dicatat adalah 1,70% pada tahun 2020, dan terendah adalah 0,60% pada tahun 1992.
- Sumber Data: Data ini didasarkan pada perkiraan model Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Indeks PDB Perkapita.

- Walau dalam posisi pemerkerjaan-penuh (*full employmen*), moral-bangsa cq budaya korup, partheid-perempuan, dan nilai tambah SDM nirpendidikan amat rendah, sehingga PDB per kapita ter-estimasi untuk tahun 2025 adalah sekitar \$1,139 USD (menurut Worldometer) atau diproyeksikan hanya mencapai sekitar \$582 USD (menurut Trading Economics).

Angka-angka PDB per Kapita Chad (Nominal):

- 2025 (Perkiraan): \$1,139 USD (menurut IMF/Worldometer).
- 2025 (Proyeksi): ~\$582 USD (menurut Trading Economics).
- 2024 (Estimasi): \$1,076 USD.
- 2021 (Data Historis): \$660.75 USD.

Faktor Pendukung & Tantangan:

- Sektor Kunci: Ekonomi Chad sangat bergantung pada sektor minyak (sekitar 60% pendapatan ekspor) dan juga pertanian (kapas, ternak).
- Tantangan: Chad menghadapi tantangan seperti iklim demokrasi nan-buruk, korupsi, aturan hukum yang lemah, dan infrastruktur yang buruk, yang menghambat pengembangan sektor swasta, meskipun ada potensi pertumbuhan.

Indeks Kesetaraan gender.

- Kita sama mafhum, indeks kesetaraan gender adalah bias-cermin indeks kemakmuran-bangsa. Kapasitas SDM bangsa nan-patriakis adalah separuh dari bangsa-bangsa yang demokratis-gender.
- Chad memiliki tantangan kesetaraan gender yang signifikan, berada di peringkat sangat rendah secara global dalam hal kesenjangan gender, dengan tingkat kekerasan berbasis gender (KBG) yang tinggi, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pernikahan paksa, meskipun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena kasus yang tidak dilaporkan; data terbaru (2024) menempatkan Chad di peringkat 144 dari 146 negara dalam Laporan Kesenjangan Gender Global WEF, mencerminkan ketimpangan kuat di

berbagai sektor seperti pendidikan dan ekonomi.

Indeks Kesetaraan Gender (Global Gender Gap Index - WEF):

- Peringkat Dunia (2024): 144 dari 146 negara.
- Skor: Sangat rendah, menunjukkan ketimpangan gender yang ekstrem di berbagai bidang.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Chad:

- Kekerasan berbasis gender adalah budaya ribuan tahun bersifat hormonal diterima sebagai hukum-adat sehingga Menteri Kebudayaan nan-genius saja mampu menghapusnya, dan kita sama mafhum bahwa bangsa bertabiat buruk ( nan-korup, tidak jujur, tidak transparan, tidak adil, suka kekerasan) terkutuk selalu miskin. Data Terbaru (2024): UNFPA mencatat 1.310 kasus (Jan-Jun) dan 794 kasus (Jul-Sep) KBG, mayoritas fisik dan psikologis, serta kasus seksual, penolakan sumber daya, dan pernikahan paksa.
- Penyebab: Akses perempuan ke aspek perekonomian yang terbatas, terutama dalam pewarisan, memperburuk ketimpangan.
- Faktor Lain: Tingginya angka kekerasan pasangan intim (27%), mirip rata-rata dunia, menurut Bank Dunia.

Chad menghadapi krisis kesetaraan gender yang parah, dengan kesenjangan gender yang mencakup seluruh aspek kehidupan, diperburuk oleh tingkat KBG yang tinggi dan hambatan struktural terhadap pemberdayaan perempuan, menempatkannya di antara negara dengan ketimpangan gender terburuk di dunia

## **Somalia**

Konstitusi

Konstitusi Somalia saat ini adalah Konstitusi Sementara Republik Federal Somalia, yang diadopsi pada tahun 2012, menetapkan Somalia sebagai negara federal, demokratis, dan Islam, dengan Syariah sebagai hukum tertinggi setelah konstitusi, mengatur sistem pemerintahan parlementer bikameral (Senat dan Dewan Rakyat), dan memberikan dasar bagi pemerintahan federal dan negara-negara anggota semi-otonom, meskipun masih menghadapi tantangan implementasi dan perselisihan terkait federalisme.

- Hukum Tertinggi: Konstitusi Sementara adalah hukum tertinggi Somalia, tunduk pada Syariah (hukum Islam).
- Bentuk Negara: Republik Federal Islam demokratis.
- Sistem Pemerintahan: Parlementer, dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
- Legislatif: Bikameral, terdiri dari Senat (majelis tinggi) dan Dewan Rakyat (majelis rendah).
- Prinsip Dasar: Federalisme (pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian), pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), hak asasi manusia, dan partisipasi inklusif.
- Status: Dokumen sementara yang masih dalam proses penyempurnaan, dengan tujuan akhir adalah konstitusi permanen.

Tantangan dan Implementasi:

- Negara mungkin tidak bersistem demokratis.
- Ambiguitas Konstitusional: Ketidakjelasan dalam dokumen konstitusi menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pemerintah federal dan negara bagian.
- Federalisme: Masih ada perdebatan mengenai pembagian kekuasaan dan sumber daya

antara Mogadishu (pusat) dan negara-negara anggota federal.

- Proses Berkelanjutan nan-melelahkan: Pembentukan struktur federal permanen dan penyelesaian isu-isu konstitusional masih menjadi agenda utama.

#### Agama utama

Agama utama di Somalia adalah Islam Sunni, yang dianut oleh lebih dari 99% penduduknya dan merupakan agama resmi negara, sangat terintegrasi dengan identitas nasional dan hukum (Syariah), sementara minoritas kecil memeluk agama Kristen atau kepercayaan tradisional Afrika, dengan tantangan signifikan bagi non-Muslim.

- Mayoritas: Lebih dari 99% penduduk Somalia adalah Muslim Sunni, mengikuti yurisprudensi mazhab Syafi'i.
- Agama Resmi: Islam adalah agama resmi negara dan memengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk sistem hukum yang sebagian besar berbasis Syariah.
- Identitas Budaya: Islam memberikan identitas yang seragam bagi warga Somalia, terlepas dari klan, dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
- Minoritas: Terdapat komunitas kecil Kristen (termasuk Katolik dan Protestan), Muslim Syiah, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan tradisional Afrika, terutama di kalangan suku Bantu, namun mereka kurang dari 1% populasi.
- Tantangan Minoritas: Penganut Kristen menghadapi penganiayaan berat, seringkali dari kelompok militan seperti Al-Shabab, dan juga dari komunitas mereka sendiri karena penolakan menjadi Muslim dianggap pengkhianatan besar.

#### Indeks Kepailitan Negara.

- Pada Desember 2023, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui keringanan utang sebesar \$4,5 miliar untuk Somalia di bawah Inisiatif Negara Miskin Berutang Besar (HIPC). Keringanan utang ini secara drastis mengurangi utang luar negeri Somalia dari 64% PDB pada tahun 2018 menjadi kurang dari 6% PDB pada akhir tahun 2023. Ini memungkinkan negara tersebut untuk membuka akses ke pembiayaan eksternal baru.
- Meskipun ada kemajuan, pada tahun 2021, Somalia tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia berdasarkan PDB per kapita.

#### Indeks budaya bangsa.

Somalia secara konsisten menempati peringkat terbawah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global yang dirilis oleh Transparency International, *menjadikannya salah satu negara paling korup di dunia*, dengan skor IPK sangat rendah (misalnya 9 poin pada tahun-tahun terakhir) pada skala 0-100, di mana 0 sangat korup dan 100 sangat bersih, menunjukkan korupsi merajalela di sektor publik seperti pengadilan, pelayanan, dan administrasi.

- Peringkat Terendah: Somalia sering kali berada di peringkat 179 dari 180 negara, atau bahkan di posisi terakhir, menunjukkan persepsi korupsi publik yang ekstrem.
- Skor Rendah: Skornya sangat rendah, seperti 9 poin pada 2024 atau 11-12 poin pada tahun-tahun sebelumnya, sangat jauh dari skor global rata-rata (sekitar 43).
- Korupsi Merajalela: Korupsi ditemukan di hampir semua sektor, termasuk sistem peradilan, kepolisian, pengadaan publik, dan administrasi pajak, seperti yang dilaporkan oleh Transparency International.

#### Faktor Penyebab:

- Budaya patriarkis nir-kesetaraan gender nan sukbermusuhan selama ribuan tahun.
- Lembaga Negara Tidak Berfungsi: Banyak lembaga negara yang disfungsi, menciptakan lingkungan di mana korupsi tumbuh subur.
- Kurangnya Regulasi: Minimnya mekanisme regulasi untuk mengendalikan situasi

korupsi.

- Konflik Internal & Kemiskinan: Konflik yang berkelanjutan dan tingkat kemiskinan ekstrem serta kekeringan menciptakan peluang korupsi yang lebih besar dan mengikis kepercayaan publik.

Kesimpulan, indeks menunjukkan bahwa budaya korupsi di Somalia sangat mengakar, dengan persepsi publik yang menempatkannya sebagai salah satu negara paling korup di dunia, dipengaruhi oleh kelemahan institusional dan kondisi sosio-ekonomi yang rentan.

#### Tantangan dan Isu

- Sistem Klan dan Konflik Internal: Meskipun struktur klan dapat memberikan dukungan, penekanan berlebihan pada loyalitas klan sering kali menjadi pemicu utama dan penghalang bagi stabilitas politik, yang menyebabkan pertikaian berkepanjangan dan kekosongan pemerintahan setelah jatuhnya rezim Siad Barre pada tahun 1991.
- Ketidakstabilan Sosial dan Politik: Akibat budaya-kekerasan, Somalia telah menghadapi konflik bersenjata selama beberapa dekade, yang menghambat pembangunan dan kemajuan ekonomi.
- Budaya di larang memuji. Kepercayaan pada "Mata Jahat": Beberapa kepercayaan tradisional, seperti "mata jahat" (kepercayaan bahwa memuji seseorang dapat mendatangkan bahaya), dapat menciptakan ketegangan sosial atau kesalahpahaman budaya.
- Hambatan Pembangunan: Dampak konflik dan ketidakstabilan telah menyebabkan Somalia diklasifikasikan sebagai salah *satu negara paling kurang berkembang*, dengan hambatan signifikan dalam implementasi inisiatif pembangunan dan partisipasi global.

#### Indeks Kekerasan

- Somalia secara konsisten menempati peringkat terbawah secara global dalam indeks kekerasan dan demokrasi, mencerminkan situasi keamanan yang sangat tidak stabil dan tantangan tata kelola pemerintahan yang signifikan.
- Indeks Terorisme Global (Global Terrorism Index): Menurut laporan Indeks Terorisme Global 2025, *Somalia dinilai sebagai negara ketujuh yang paling terkena dampak terorisme secara global*. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam lima tahun terakhir, terorisme tetap menjadi ancaman utama.
- Indeks Perdamaian Global (Global Peace Index): Dalam laporan Indeks Perdamaian Global 2025, Somalia menempati peringkat 151 dari 163 negara, masih *termasuk di antara negara-negara paling tidak damai di dunia*, meskipun ada sedikit peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya (dari peringkat 6 ke 14 di antara negara-negara paling tidak aman).
- Korban Sipil: Konflik antara pemerintah federal, pasukan sekutu internasional (seperti ATMIS dan AS), dan al-Shabaab terus menimbulkan *banyak korban sipil*. Al-Shabaab konon bertanggung jawab atas sebagian besar (65%) dari semua korban sipil yang tercatat pada tahun 2023.
- Indeks Kejahatan Terorganisir: Somalia berada di peringkat 34 dari 193 negara dalam Indeks Kejahatan Terorganisir, dengan skor tinggi untuk perdagangan manusia dan kelompok bergaya mafia.

#### Indeks Demokrasi

- Proses demokrasi di Somalia sangat lemah dan rapuh.,tak ada pemilu jurdil.
- Negara ini digolongkan sebagai "Tidak Bebas" oleh berbagai organisasi pemeringkat.
- Freedom House: Dalam laporan "Freedom in the World 2025", Somalia dinilai sebagai "Tidak Bebas". Urusan politik masih didominasi oleh perpecahan klan dan belum ada pemilihan umum nasional langsung yang diadakan hingga saat ini.

- International IDEA (Global State of Democracy): Somalia menunjukkan kinerja dalam kisaran rendah di seluruh kategori kerangka kerja Global State of Democracy. Ia berada di antara 25 persen negara terbawah di sebagian besar faktor seperti representasi, hak-hak, dan aturan hukum.
- Indeks Demokrasi Elektoral V-Dem: Nilai terbaru dari tahun 2024 adalah 0,169 poin indeks (skala 0 hingga 1), yang merupakan penurunan kecil dari tahun 2023. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia (0,489), menunjukkan sejauh mana kekuasaan politik diperoleh dan dilaksanakan melalui pemilihan yang bebas dan adil sangat rendah.
- Transparansi Internasional: Somalia secara konsisten menempati *peringkat terbawah dari 180 negara* dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi yang selanjutnya melemahkan institusi demokrasi.

Secara keseluruhan, Somalia berada dalam kondisi krisis kemanusiaan dan keamanan yang parah, dengan institusi demokrasi yang sangat lemah dan tingkat kekerasan yang tinggi Indeks pendidikan.

- Data yang tersedia menunjukkan tingkat pendidikan di Somalia secara umum sangat rendah akibat konflik berkepanjangan, dengan sebagian besar populasi tidak memiliki pendidikan formal.
- Berikut adalah gambaran umum tingkat pendidikan di Somalia berdasarkan data survei angkatan kerja dan laporan pendidikan terbaru:
- Mayoritas Tanpa Pendidikan Formal: Sekitar 65,5% populasi Somalia tidak memiliki pendidikan formal sama sekali pada tahun 2022.
- Pendidikan Menengah Sangat Rendah: Kurang dari 5% populasi telah menyelesaikan pendidikan menengah (SMA).
- Tingkat Melek Huruf Dewasa: Tingkat melek huruf orang dewasa diperkirakan sekitar 41% secara nasional, dengan perbedaan gender yang signifikan (54% pria dan 22% wanita).
- Perbedaan Regional: Akses pendidikan sangat timpang antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan nomaden. Hampir semua populasi nomaden (92,5%) tidak memiliki pendidikan formal.
- Angkatan Kerja Formal: *Sebagian besar angkatan kerja di Somalia berada di sektor informal atau pekerjaan rentan* (mencapai 40% dari total pekerjaan), di mana upah seringkali tidak sepadan dengan pendidikan atau pengalaman mereka.

Data terperinci mengenai tingkat pendidikan *khusus* di dalam sub-populasi angkatan kerja formal sulit ditemukan karena keterbatasan statistik dan sifat pasar tenaga kerja Somalia yang didominasi informal. Laporan dari Biro Statistik Nasional Somalia (SNBS) dan Bank Dunia menyediakan gambaran umum tentang ketenagakerjaan dan pendidikan, tetapi tidak ada indeks pendidikan yang spesifik untuk angkatan kerja formal yang dipublikasikan secara luas.

Indeks pengangguran.

- Jumlah pekerja sektor informal cukup tinggi.
- Tingkat upah/gaji pekerja formal amat buruk.
- Tingkat pengangguran di Somalia sangat tinggi, dengan data terbaru menunjukkan sekitar 18.86% pada tahun 2024, namun angka ini sering kali jauh lebih tinggi dalam praktik, terutama untuk pemuda dan perempuan, di mana lebih dari dua pertiga pengangguran terjadi di kalangan dewasa muda dan sering kali melebihi 60-70% menurut laporan lama, karena kurangnya peluang kerja formal dan ketidakstabilan ekonomi.

Data dan Fakta:

- Angka Umum Pengangguran (2024): 18.86% (menurut Macrotrends).
- Angka di Kalangan Pemuda: Lebih dari dua pertiga (lebih dari 67%) pengangguran terjadi di kalangan usia di bawah 30 tahun, menurut laporan PBB tahun 2012, dan tingkat pengangguran kaum muda mencapai 35% pada tahun 2025.
- Tingkat Tinggi: Somalia termasuk negara dengan tingkat pengangguran terparah di dunia akibat ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja.

#### Penyebab:

- Kurangnya Peluang Kerja: Terbatasnya pekerjaan formal, kesenjangan keterampilan, dan kurangnya layanan ketenagakerjaan.
- Pertumbuhan Penduduk: Pertumbuhan populasi yang cepat menambah tekanan pada pasar kerja.
- Isu Struktural: Korupsi, kurangnya transparansi dalam perekrutan, dan sistem kuota klan membatasi peluang bagi lulusan baru.

#### Indeks PDB Perkapita.

- PDB per kapita Somalia diperkirakan sekitar \$763 (USD) di 2025, dengan proyeksi pertumbuhan PPP sekitar \$1.450 USD, mencerminkan tantangan ekonomi yang berlanjut namun dengan potensi pemulihan.

#### PDB per Kapita

- Tahun 2025 (Perkiraan): Sekitar \$763 USD, meningkat dari \$737 pada 2024 (menurut Worldometer).
- Tahun 2025 (PPP - Perkiraan): Diperkirakan mencapai \$1.450 USD (menurut Trading Economics dan analisis).
- Tren: Menunjukkan pertumbuhan kecil namun stabil, dengan proyeksi naik ke \$1.494 USD pada 2026 dan \$1.546 USD pada 2027 (PPP).

#### Indeks Kesetaraan gender.

- Budaya patriarkis kekerasan berbasis gender sepanjang ribuan tahun.
- Somalia menghadapi tantangan signifikan dalam kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, secara konsisten menempati peringkat terendah secara global dalam indeks ketimpangan gender.

#### Indeks Kesetaraan Gender makin buruk

Somalia menduduki peringkat sangat rendah pada Indeks Ketimpangan Gender (GII) yang disusun oleh Program Pembangunan PBB (UNDP).

- Peringkat Global: Somalia berada di *peringkat keempat atau ketiga terendah* secara global dalam indeks ketimpangan gender.
- Skor GII: Skor GII Somalia adalah 0,776 (di mana skor 1,0 menunjukkan ketimpangan total).
- Tantangan Utama: Ketimpangan gender di Somalia diperburuk oleh kemiskinan, norma-norma klan yang patriarkal, dan konflik berkepanjangan. Perempuan menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
- Prevalensi Tinggi: Kekerasan berbasis gender (GBV) adalah fenomena yang "sangat umum dan persisten" di Somalia.
- Bentuk Kekerasan: Bentuk GBV yang paling umum meliputi:
  - Mutilasi/Pemotongan Genital Perempuan (FGM/C): Diperkirakan 98% perempuan dan anak perempuan Somalia (usia 15-49) telah menjalani FGM, menurut data UNFPA tahun 2020.
  - Pernikahan Dini dan Paksa.
  - Kekerasan Fisik dan Seksual: Termasuk kekerasan dalam hubungan intim (IPV),

pemeriksaan, dan pemeriksaan berkelompok yang sering dikaitkan dengan konflik, terutama di kamp-kamp pengungsi internal (IDP) yang padat.

- PBB tak berdaya. Peningkatan Kasus: Mitra perlindungan anak UNICEF melaporkan peningkatan 25% dalam kasus GBV yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak perempuan pada paruh pertama tahun 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
- Kerentanan: Perempuan dan anak perempuan di Somalia menjadi semakin rentan akibat beberapa kali perpindahan paksa, kondisi kehidupan yang sulit, dan kurangnya akuntabilitas hukum bagi pelaku.

Laporan dan data terperinci lebih lanjut mengenai situasi ini dapat ditemukan melalui sumber UNFPA Somalia dan UNDP Somalia.

## **Nigeria**

### Konstitusi

Konstitusi Nigeria saat ini adalah Konstitusi 1999 (The Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999), yang menjadikan Nigeria sebagai republik federal dengan sistem presidensial, meniru AS, dan menetapkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi ini merupakan hukum tertinggi negara, menjamin hak-hak warga negara seperti privasi (Pasal 37) dan kebebasan lainnya, serta mencerminkan sistem hukum campuran antara hukum Inggris, adat, dan Islam (di wilayah utara).

Fitur Utama Konstitusi Nigeria 1999:

- Bentuk Pemerintahan: Republik federal dengan sistem presidensial, dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
- Sistem Legislatif: Dibagi menjadi Majelis Nasional (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat).
- Sistem Yudikatif: Dipimpin oleh Mahkamah Agung.
- Sistem Hukum: Campuran hukum legislatif, hukum umum Inggris, hukum adat, dan hukum Islam (syariah) di beberapa wilayah.
- Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak fundamental seperti privasi (Pasal 37), kebebasan pribadi, kebebasan beragama, dan hak atas pengadilan yang adil.

Konteks Sejarah:

- Nigeria telah mengalami beberapa konstitusi sejak kemerdekaan pada tahun 1960, termasuk Konstitusi 1960, 1963 (menjadikan Nigeria republik), 1979, hingga 1999.
- Konstitusi 1999 adalah respons terhadap periode pemerintahan militer dan dirancang untuk membangun kembali institusi demokrasi.

Tantangan Implementasi:

- Meskipun konstitusi menjamin hak, implementasi konstitusi menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan isu-isu terkait keragaman budaya dan agama yang kompleks, serta isu keadilan gender.

Agama utama

- Agama utama di Nigeria adalah Islam dan Kristen, dengan populasi yang hampir seimbang, meskipun Islam sering kali sedikit lebih dominan secara keseluruhan (sekitar 50% Islam, 48% Kristen, sisanya kepercayaan asli), dengan Islam lebih kuat di Utara dan Kristen di Selatan, mencerminkan perpecahan geografis yang signifikan di negara ini.

Rincian Utama:

- Islam: Dominan di Nigeria Utara, terutama di kalangan etnis Hausa-Fulani, dengan

aliran Sunni yang paling banyak.

- Kristen: Mayoritas di Nigeria Selatan, dengan pertumbuhan kuat di kalangan Protestan dan Katolik.
- Agama Tradisional: Sekitar 1-2% menganut kepercayaan asli Afrika atau tidak beragama.

Perbandingan Estimasi:

- Pew Research (2010): 49.3% Kristen, 48.8% Muslim.
- CIA World Factbook (2018): 53.5% Muslim, 45.9% Kristen.
- Survei Afrobarometer (2022): 54.2% Kristen, 45.5% Muslim (mungkin mencerminkan bias sampel Selatan).

Indeks Kepailitan Negara.

- Nigeria menempati peringkat ke-148 dari 190 negara dalam indikator penyelesaian kepailitan (*Resolving Insolvency*).

Berikut rincian metrik utama dari laporan tersebut:

- Peringkat: 148 dari 190 negara.
- Skor (0-100): 30,6 (di mana 100 adalah kinerja terbaik).
- Tingkat pemulihan: Kreditur pulih sekitar 27,8 sen per dolar yang diinvestasikan.
- Waktu: Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus kepailitan adalah 2,0 tahun.
- Biaya: Biaya rata-rata proses kepailitan mencapai 22,0% dari nilai harta kekayaan.
- Kerangka kerja: Nigeria memiliki indeks kekuatan kerangka kerja kepailitan sebesar 5,0 dari 16.

Bank Dunia telah menghentikan laporan *Doing Business*-nya, jadi tidak ada peringkat yang lebih baru untuk tahun 2024 atau 2025 dari sumber tersebut. Laporan internasional lainnya lebih fokus pada utang publik, stabilitas ekonomi, atau indeks persepsi korupsi, bukan indeks kepailitan spesifik.

Indeks budaya bangsa.

- Budaya Nigeria kaya akan nilai positif seperti penghormatan kuat pada orang tua, kebersamaan keluarga, kerja keras, dan kejujuran, serta praktik budaya yang beragam dan kaya akan tradisi kuliner dan perayaan; namun, hambatan/tantangan budaya meliputi isu jarak kekuasaan tinggi, potensi konflik norma akibat globalisasi (misalnya pandangan terhadap homoseksualitas), serta perlunya harmonisasi antara nilai tradisional dan modernisasi untuk pembangunan yang inklusif.

Nilai dan Kebiasaan Positif (Budaya Baik)

- Penghormatan Tinggi: Penghormatan mendalam kepada orang tua dan tokoh senior adalah inti budaya Nigeria.
- Keluarga & Komunitas: Keluarga adalah pusat kehidupan, dengan tradisi kuat berkumpul untuk perayaan (kelahiran, pernikahan, pemakaman) dan dukungan sosial.
- Kerja Keras & Kejujuran: Nilai seperti kerja keras, kejujuran, keberanian, dan kepedulian sering dijunjung tinggi, meskipun menghadapi tantangan globalisasi.
- Keanekaragaman Kuliner & Perayaan: Makanan adalah bagian penting, dengan variasi sup, biji-bijian, dan protein, serta perayaan hari besar keagamaan dan nasional.
- Konteks Tinggi: Komunikasi seringkali bersifat kontekstual tinggi, yang dapat mempererat hubungan interpersonal.

Hambatan / Tantangan dan Aspek Negatif (Budaya Buruk/Area Pengembangan)

- Jarak Kekuasaan Tinggi (High Power Distance): Mempengaruhi hierarki dan persepsi kekuasaan, terkadang menciptakan masalah kelemahan warga negara dan kepemimpinan

yang otoriter.

- Konflik Nilai: Modernisasi dan globalisasi kadang mengikis nilai tradisional (individualisme mengalahkan kebersamaan), dan ada tabu sosial kuat seperti homoseksualitas yang menimbulkan konflik.
- Tabu Budaya: Mengabaikan orang tua, menunjuk dengan kaki, dan melanggar norma dianggap tabu, menunjukkan perlunya kepekaan budaya.
- Potensi Ketidakstabilan: Adopsi kebijakan tanpa mempertimbangkan modal budaya adat dapat menghambat pembangunan, menunjukkan perlunya pendekatan "bottom-up".

Budaya Nigeria menghadapi tantangan signifikan terkait korupsi yang merebak/meluas, yang sebagian disebabkan oleh faktor-faktor budaya dan sejarah ribuan tahun yang susah diubah, meskipun nilai-nilai kejujuran secara formal tetap diakui.

#### Korupsi di Nigeria

- Peringkat Global: Nigeria secara konsisten mendapat *peringkat rendah pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International*. Pada tahun 2024, negara ini berada di *peringkat ke-140 dari 180 negara*, yang mengindikasikan tingkat korupsi sektor publik /kepemerrintahan nan-tinggi.
- Dampak Ekonomi: Korupsi telah merugikan perekonomian Nigeria lebih dari \$550 miliar sejak kemerdekaan, menghambat pembangunan kemakmuran.
- Penyebab Budaya: Beberapa sumber menunjukkan bahwa korupsi ribuan-tahun dipicu oleh faktor-faktor nafsu-buruk seperti keserakahan, gaya hidup mewah, tribalisme (loyalitas kelompok di atas kepentingan umum), dan masyarakat-hipokrit memilih/memuja pejabat korup alih-alih mengucilkannya. Adat istiadat tertentu ribuan-tahun mungkin berbasis-genetika juga, diyakini turut berkontribusi terhadap masalah ini.
- Pengaruh Sejarah: Analisis pascakolonialisme juga mengusut jejak kolonialisme Inggris sebagai penyubur cq salah satu faktor yang memengaruhi budaya korupsi di Nigeria.

#### Budaya Kejujuran

- Tak ada budaya kejujuran selama ribuan tahun.
- Nilai Formal: Meskipun korupsi merajalela, nilai-nilai kejujuran secara formal ada dalam masyarakat dan sistem etika, sering kali didukung oleh ajaran agama. Kejujuran dipahami sebagai tindakan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang, serta memegang amanah.
- Upaya Perubahan: Ada upaya yang sedang berlangsung untuk mempromosikan budaya integritas dan kejujuran. Hal ini termasuk program pencerahan publik dan advokasi oleh lembaga keagamaan serta badan anti-korupsi seperti Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC).

Secara ringkas, Nigeria menghadapi dilema di mana nilai-nilai tradisional kejujuran dan integritas bersaing dengan praktik korupsi sistemik yang mengakar, yang didorong oleh tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.

Secara keseluruhan, budaya Nigeria menawarkan fondasi kuat dalam nilai-nilai genetika keluarga dan kerja keras, dalam lingkungan tantangan modernisasi dan struktur kekuasaan yang kompleks, yang perlu diseimbangkan untuk kemajuan.

#### Indeks demokrasi

- Nigeria menunjukkan kinerja demokrasi yang beragam, berada di peringkat menengah hingga bawah tergantung pada kategori penilaian, dengan kekuatan pada Keterlibatan Sipil dan Kebebasan Pers namun tantangan signifikan pada Aturan Hukum (Rule of Law),
- Independensi Peradilan, dan Partisipasi Pemilu yang menurun, mencerminkan isu

korupsi, ketidakpuasan publik, dan tekanan ekonomi yang memengaruhi praktik demokrasi di negara tersebut.

Indeks Demokrasi Nigeria (Berdasarkan Data IDEA dan Afrobarometer):

- Kinerja Menengah: Nigeria berada di kisaran menengah pada kategori Representasi, Hak, dan Partisipasi dalam Kerangka Kerja Demokrasi Global (Global Democracy Framework).
- Kinerja Rendah: Negara ini termasuk dalam 25% terbawah untuk faktor-faktor krusial seperti Aturan Hukum, Hak, dan Partisipasi Pemilu.
- Penurunan: Terjadi penurunan signifikan dalam Independensi Peradilan, Akses terhadap Keadilan, dan Parlemen yang Efektif dalam beberapa tahun terakhir.
- Ketidakpuasan Publik: Meskipun banyak warga Nigeria menerima ide demokrasi, ada penurunan kepuasan terhadap pelaksanaannya, sering kali dikaitkan dengan korupsi politik.
- Tantangan Sosial-Ekonomi: Inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan memperburuk tantangan, meskipun ada inisiatif swadaya dan peran organisasi amal.
- Toleransi: Ada indikasi penurunan toleransi antar kelompok agama dan etnis.

Komponen Penilaian (Umum dalam Indeks Demokrasi), Indeks Demokrasi biasanya mengukur berdasarkan lima kategori utama:

1. Proses Elektoral & Pluralisme
2. Fungsi Pemerintahan
3. Partisipasi Politik
4. Budaya Politik
5. Kebebasan Sipil

Secara keseluruhan, budaya demokrasi Nigeria menghadapi kondisi menyedihkan, hambatan dan tantangan struktural dan sosial.

Indeks pendidikan.

- Indeks budaya pendidikan Nigeria menunjukkan penekanan kuat pada pendidikan sebagai jalan menuju keamanan finansial, terlihat dari tingginya aspirasi akademis di komunitas diaspora.
- Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar dalam akses, kualitas, dan kesenjangan regional, dengan tingkat putus sekolah tinggi, kelas padat (bahkan 100+ murid), serta masalah literasi, terutama bagi perempuan dan di wilayah utara akibat faktor sosial-budaya dan konflik.
- Pemerintah berupaya meningkatkan literasi (dengan target 95% digital 2030) dan akses, namun kendala seperti kemiskinan, lokasi pedesaan, dan isu gender masih signifikan, menunjukkan dilema antara nilai budaya pendidikan dan realitas implementasi.

Budaya Pendidikan di Nigeria:

- Nilai Tinggi Pendidikan: Budaya Nigeria sangat menghargai pendidikan sebagai kunci kesuksesan dan keamanan finansial, menciptakan dorongan kuat untuk keunggulan akademis.
- Sistem Pendidikan Terstruktur: Menggunakan sistem 6-3-3-4 (SD-SMP-SMA-Universitas), dengan pendidikan dasar resmi wajib.

Tantangan Utama:

- Kesenjangan Kualitas: Peringkat kualitas pendidikan dasar dan tinggi Nigeria relatif rendah secara global (misal: peringkat 120 & 117 dari 137 negara di 2017/2018).
- Akses & Partisipasi: *Jutaan anak tidak sekolah*, dengan hambatan ekonomi dan norma budaya (terutama bagi anak perempuan di utara) menghambat akses formal.

- Kepadatan Kelas: Kelas SD sangat padat, rata-rata 51 murid, bahkan bisa mencapai 100+ di beberapa negara bagian (misal: Katsina).
- Anak Putus Sekolah: Tingkat putus sekolah meningkat, dan partisipasi pendidikan tinggi rendah (sekitar 8-12% pada 2011-2013), kata Tandfonline.
- Literasi: Tantangan literasi tradisional dan digital, meskipun pemerintah menargetkan 95% literasi digital pada 2030.

#### Upaya dan Inisiatif:

- Program Pendidikan Dasar Universal (UBEP): Diluncurkan untuk memperluas akses pendidikan dasar berkualitas.
- Fokus Literasi: Pemerintah memprioritaskan peningkatan literasi fungsional dan digital melalui kemitraan dengan UNESCO.
- Inklusi: Membangun fasilitas inklusif (air, sanitasi, keselamatan) dan program untuk anak putus sekolah.

Secara keseluruhan, Nigeria memiliki kesadaran dan budaya yang mendambakan pendidikan, tetapi sistem gagal mengatasi masalah implementasi, kualitas, dan ketidaksetaraan, yang diperburuk oleh faktor demografi dan ekonomi.

#### Indeks pengangguran

- Tingkat pengangguran di Nigeria secara historis tinggi, tertinggi didunia, meskipun data terkini menunjukkan penurunan. Secara budaya, masyarakat Nigeria umumnya dikenal memiliki budaya etos-kerja yang kuat dan menghargai pendidikan, menepis anggapan malas.
- Tingkat Pengangguran Terbaru: Tingkat pengangguran di Nigeria turun menjadi 4,3% pada kuartal kedua tahun 2024, dari 5,3% pada kuartal pertama 2024. Pengangguran Pemuda: Pengangguran di kalangan pemuda juga menurun menjadi 6,5% pada kuartal kedua 2024.
- Konteks Historis: Angka-angka saat ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak sebelumnya. Pada tahun 2020, Nigeria mencatat *tingkat pengangguran setinggi 33,3%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia saat itu.*
- Masalah Struktural: Terlepas dari angka resmi yang lebih rendah, masih banyak pemuda yang menganggur atau bekerja di bawah kapasitas penuh (bekerja kurang dari 40 jam seminggu).

Budaya Kerja dan Belajar : Stereotip "malas" tidak sesuai dengan deskripsi budaya kerja di Nigeria berdasarkan sumber yang tersedia:

- Etos Kerja: Orang Nigeria umumnya digambarkan sebagai individu yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki sikap "bisa melakukan" atau "pantang menyerah". Lingkungan kerja sering kali menuntut jam kerja yang panjang, terutama di sektor-sektor kunci seperti perbankan, kesehatan, dan teknologi.
- Pentingnya Pendidikan: Terdapat kesadaran yang kuat akan pentingnya pendidikan. Pemerintah dan masyarakat memandang pendidikan sebagai landasan untuk etika, moral, dan keterampilan hidup. Banyak keluarga berinvestasi besar dalam pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk memperbaiki sumber daya manusia dan prospek ekonomi.
- Fokus Hubungan: Budaya bisnis di Nigeria sangat berorientasi pada hubungan personal dan hierarkis. Membangun kepercayaan dan hubungan baik dianggap penting untuk kesuksesan profesional.

Kesimpulannya, meskipun Nigeria menghadapi masalah pengangguran struktural yang parah akibat kurangnya lapangan kerja yang memadai, hal ini bukan cerminan dari budaya malas, melainkan tantangan ekonomi dalam menyediakan pekerjaan bagi populasi yang

besar dan energik.

#### Indeks PDB Perkapita.

- PDB per kapita Nigeria bervariasi tergantung sumber dan metode perhitungan (nominal atau PPP), namun diperkirakan sekitar \$2.400 - \$2.500 USD untuk 2025 berdasarkan data nominal (seperti Trading Economics dan Worldometer, dengan proyeksi naik di tahun-tahun berikutnya), sementara PDB per kapita PPP (Paritas Daya Beli) diperkirakan sekitar \$5.800 - \$5.900 USD pada tahun yang sama (Trading Economics).

#### Data Terbaru (Estimasi 2025):

- PDB per Kapita (Nominal): Sekitar \$2.489,00 USD (proyeksi akhir 2025).
- PDB per Kapita (PPP): Sekitar \$5.835,00 USD (proyeksi akhir 2025).

#### Data Historis (Sebagai Perbandingan):

- 2023: \$ 2.416 USD (nominal).
- 2022: \$ 2.955,32 USD (nominal).
- 2019: Mencapai tertinggi nominal \$ 3.315,55 USD sebelum menurun.

#### Penting untuk Dicatat:

- Nominal: PDB dibagi dengan total populasi menggunakan nilai tukar saat ini.
- PPP (Paritas Daya Beli): Menyesuaikan PDB dengan biaya hidup lokal untuk perbandingan yang lebih akurat antar negara.
- Angka-angka ini adalah estimasi dan dapat berbeda antar lembaga (IMF, Worldometer, dll.).

#### Indeks Kesetaraan gender.

- Nigeria adalah negara patriarkis dan negara apartheid-gender, secara konsisten menempati peringkat rendah dalam indeks kesetaraan gender global dan menghadapi tingkat kekerasan seksual yang signifikan.

#### Indeks Kesetaraan Gender

- Peringkat Global: Nigeria berada di peringkat 124 dari 148 negara dalam Laporan Kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap Report) tahun 2025 yang diterbitkan oleh World Economic Forum. Pada tahun 2024, Nigeria berada di peringkat 125 dari 146 negara, menunjukkan sedikit pergerakan dalam peringkat secara keseluruhan.
- Skor Paritas: Nigeria memperoleh skor paritas gender keseluruhan sebesar 64,9% pada tahun 2025, yang berarti negara tersebut masih memiliki kesenjangan gender sekitar 35,1% yang harus ditutup.
- Dimensi Utama: Indeks ini mengukur empat dimensi: partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Nigeria menunjukkan perbaikan dalam partisipasi ekonomi, namun mengalami regresi signifikan dalam pemberdayaan politik, menempati *peringkat 143 dari 144 negara untuk representasi perempuan di posisi menteri pada tahun 2025*.
- Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) UNDP: Dalam laporan UNDP, Nigeria memiliki skor GII yang tinggi (menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih besar), dan *merupakan salah satu dari 10 negara dengan skor GII terburuk secara global*.

#### Pemeriksaan dan Kekerasan Seksual

- Prevalensi Tinggi: Budaya kekerasan-seksual ribuan-tahun. Ketidaksetaraan gender di Nigeria sangat dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki di banyak wilayah, yang berkontribusi pada prevalensi kekerasan berbasis gender yang tinggi.
- Lonjakan Kasus: Kasus pemeriksaan dan kekerasan seksual melonjak signifikan, terutama selama masa *lockdown* COVID-19, mendorong beberapa gubernur di Nigeria

untuk menyatakan keadaan darurat atas krisis tersebut pada tahun 2020.

- Respons dan Data: Data spesifik mengenai tingkat hukuman atau statistik pemerkosaan nasional yang komprehensif sulit didapat, namun organisasi seperti UN Women dan PBB memiliki program dan data kekerasan berbasis gender di Nigeria. Terdapat kerangka kerja hukum sebesar 66,7% yang berlaku untuk mempromosikan dan memantau kesetaraan gender dengan fokus pada kekerasan terhadap perempuan berdasarkan indikator SDG.

## **Yaman**

### Konstitusi

Konstitusi Yaman (Republik Yaman) adalah dokumen hukum tertinggi yang mendefinisikan Yaman sebagai negara Arab, Islam, merdeka, dan berdaulat, dengan Syariah (hukum Islam) sebagai sumber utama semua hukum.

Konstitusi yang diratifikasi tahun 1991 ini mengamanatkan sistem republik, menjamin hak-hak individu, kesetaraan di depan hukum, dan pluralisme politik, meskipun terjadi amandemen tahun 2001 yang memperpanjang masa jabatan presiden dan parlemen, serta upaya perancangan konstitusi baru setelah Revolusi 2011-2012 yang belum final.

Butir Kunci Konstitusi Yaman:

- Dasar Agama: Islam adalah agama negara, bahasa Arab adalah bahasa resmi, dan Syariah Islam adalah sumber utama legislasi.
- Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan berasal dari rakyat yang menjalankannya melalui pemilihan umum dan referendum.
- Sistem Pemerintahan: Republik dengan pembagian kekuasaan antara Presiden, Perdana Menteri, Dewan Menteri, Parlemen, dan Mahkamah Agung, dengan sistem multipartai.
- Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak individu, kesetaraan warga negara di depan hukum (termasuk pria dan wanita), dan kebebasan berpolitik.
- Amandemen: Amandemen tahun 2001 memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 7 tahun dan parlemen menjadi 6 tahun.
- Status Saat Ini: Rancangan konstitusi baru yang disusun pada 2015 belum diratifikasi sepenuhnya karena adanya ketidaksepakatan politik, sehingga konstitusi 1991 dengan amandemen 2001 masih menjadi acuan utama meskipun ada upaya reformasi.

Intinya, Yaman memiliki konstitusi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, meskipun implementasinya dipengaruhi oleh dinamika politik internal.

### Agama utama

- Agama utama di Yaman adalah Islam, dengan hampir seluruh penduduknya beragama Muslim, terbagi menjadi mayoritas Sunni (sekitar 60-65%) dan minoritas Syiah Zaydi yang signifikan (sekitar 35-40%).
- Terdapat pula komunitas Kristen dan Yahudi yang sangat kecil, meskipun jumlahnya tidak pasti karena migrasi dan kekhawatiran keamanan, dengan Islam menjadi landasan utama kehidupan sosial dan hukum di Yaman.

Pengaruh dalam Kehidupan:

- Islam memandu hampir semua aspek kehidupan di Yaman.
- Konstitusi Yaman mensyaratkan pejabat untuk memenuhi kewajiban Islam mereka, dan semua pejabat bersumpah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

### Indeks Kepailitan

Yaman diklasifikasikan *sebagai salah satu negara termiskin dan paling berisiko di dunia.*

Gambaran Situasi Ekonomi Yaman:

- Krisis Kemanusiaan Terburuk: Yaman saat ini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk secara global, dengan lebih dari separuh populasinya membutuhkan bantuan.
- Kemiskinan Meluas: Hampir 83% warga Yaman hidup di bawah garis kemiskinan, menjadikannya negara "termiskin" di Timur Tengah.
- Ekonomi yang Rapuh: Negara ini mengalami ketidakamanan ekonomi yang meluas, kekurangan gizi, dan sistem perawatan kesehatan yang rentan. Perekonomiannya sangat bergantung pada impor makanan (sekitar 90%) dan ekspor minyak yang fluktuatif, sehingga rentan terhadap gangguan perdagangan.
- Perpecahan Institusional: Institusi-institusi negara, termasuk pemerintahan dan bank sentral, terpecah atau terbagi antara faksi-faksi yang bertikai, yang menghambat upaya pemulihan ekonomi.
- Peringkat Risiko: Berbagai organisasi internasional, seperti International Rescue Committee (IRC), menempatkan Yaman pada peringkat teratas dalam daftar negara yang paling berisiko mengalami bencana kemanusiaan.

Secara keseluruhan, Yaman berada pada tingkat risiko yang sangat tinggi, mendekati keruntuhan ekonomi di beberapa sektor. Institusi internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) terus memantau situasi dan memperkirakan pemulihan yang sangat bertahap dalam jangka menengah, tergantung pada stabilitas keamanan.

Indeks budaya bangsa

Praktik bisnis dan interaksi sosial di Yaman sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan struktur kesukuan, yang menekankan pada hubungan pribadi, kepercayaan, dan kesabaran.

Aspek Budaya Utama:

- Mayoritas Muslim: Lebih dari 99% penduduk Yaman beragama Islam, terbagi antara mazhab Syafi'i Sunni dan Zaydi Syiah. Agama Islam menjadi landasan nilai-nilai sosial dan moral sepanjang ribuan tahun.
- Struktur Kesukuan dan Hierarkis: Budaya ribuan tahun masyarakat Yaman secara tradisional bersifat hierarkis dan terorganisasi berdasarkan suku. Loyalitas terhadap keluarga dan suku sangat kuat dan mendefinisikan banyak interaksi sosial.
- Pentingnya Hubungan Pribadi: Membangun hubungan dan kepercayaan pribadi (terkadang melalui banyak pertemuan dan negosiasi) dianggap penting dalam bisnis dan kehidupan sosial sebelum mencapai kesepakatan atau kerja sama.
- Tradisi Arsitektur: Salah satu artefak budaya Yaman yang paling terkenal adalah arsitektur domestiknya yang khas, yang telah ada selama lebih dari 2.000 tahun.
- Peran Gender: Terdapat pemisahan gender yang signifikan dalam masyarakat Yaman, yang memengaruhi interaksi sosial sehari-hari.

Konteks Saat Ini (Krisis Kemanusiaan).

- Penting untuk dicatat bahwa Yaman saat ini sedang mengalami krisis kemanusiaan yang parah akibat konflik berkepanjangan.
- Kondisi ini telah menyebabkan Yaman menempati peringkat teratas dalam berbagai indeks negatif yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan, bukan karena budayanya, melainkan karena situasi konflik dan ekonomi.

Indeks Terkait Krisis:

- Indeks Perdamaian Global: Pada tahun 2024, Yaman dianggap sebagai *negara paling tidak damai di dunia.*

- Indeks HAM dan Supremasi Hukum: Yaman memiliki indeks Hak Asasi Manusia (HAM) dan supremasi hukum yang terburuk.
- *Krisis Kelaparan: Sebagian besar populasi menghadapi kerawanan pangan parah dan malnutrisi.*

Indeks demokrasi.

- Tidak ada iklim demokrasi di Yaman.
- Yaman saat ini berada dalam cengkeraman perang sipil yang berkepanjangan, sehingga konsep indeks demokrasi dan pemilu yang bebas dan adil menjadi tidak relevan dalam konteks pemerintahan negara tersebut.
- Negara ini tidak berfungsi sebagai negara demokrasi yang utuh, lembaga-lembaga demokrasi konvensional tidak berjalan efektif.

Berikut adalah gambaran mengenai situasi demokrasi dan pemilu di Yaman:

- Status Politik Saat Ini: Yaman terpecah antara faksi-faksi yang bertikai. Kelompok Houthi (Ansar Allah) menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara, sementara pemerintah yang diakui secara internasional beroperasi di wilayah lain. Akibatnya, tidak ada pemerintahan pusat yang stabil dan efektif di seluruh negeri.
- Indeks Demokrasi: Karena konflik yang sedang berlangsung, *Yaman diklasifikasikan sebagai rezim otoriter atau negara yang gagal (fragile state) oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional, bukan sebagai negara demokrasi.* Pluralisme politik sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, dan kebebasan sipil dilanggar secara luas. *Data indeks demokrasi yang spesifik untuk tahun 2024 atau 2025 dari lembaga seperti Economist Intelligence Unit (EIU) cenderung menempatkan Yaman di peringkat terbawah secara global.*
- Pemilihan Umum: Pemilu nasional yang kredibel dan inklusif tidak mungkin diselenggarakan dalam kondisi perang sipil saat ini. Pemilihan umum terakhir yang signifikan terjadi bertahun-tahun lalu sebelum konflik memburuk. Segala bentuk "pemilu" yang mungkin terjadi di wilayah yang dikuasai oleh faksi tertentu tidak dianggap sebagai pemilu yang bebas dan adil secara internasional.

*Secara keseluruhan, kondisi di Yaman ditandai oleh krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan ketidakstabilan politik yang ekstrem, membuat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang sah menjadi mustahil untuk saat ini.*

Indeks pendidikan

Yaman memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dan menghadapi tantangan signifikan dalam sektor pendidikan, yang berdampak langsung pada kualitas angkatan kerjanya.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Nilai IPM Yaman terbaru yang tersedia dari tahun 2023 adalah 0,47 poin, menempatkannya dalam *kategori pembangunan manusia yang rendah (Low Human Development)* dan salah satu yang *terendah di Asia dan dunia Arab.* IPM mengukur tiga dimensi dasar: kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak.
- Angka Melek Huruf: Tingkat melek huruf secara keseluruhan untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas di Yaman adalah sekitar 49 persen. *Angka melek huruf Yaman sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata global.*
- Tantangan Pendidikan: Sistem pendidikan di Yaman sangat terhimpit akibat krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Banyak anak putus sekolah (sekitar 29,13% pada 2016 untuk usia sekolah menengah pertama) dan akses terhadap pendidikan formal sangat sulit di daerah konflik.
- Angkatan Kerja: Sektor pertanian masih menjadi salah satu sumber lapangan kerja

utama, menyerap sekitar 29,26% dari total angkatan kerja pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Yaman dilaporkan sekitar 41,7% pada tahun 2018, dengan tingkat pengangguran tinggi, yaitu sekitar 17,36% pada tahun 2022.

*Secara keseluruhan, konflik yang berlarut-larut telah merusak infrastruktur pendidikan dan menghambat akses, menghasilkan tingkat pendidikan yang rendah di antara angkatan kerja dan berkontribusi pada IPM yang sangat rendah.*

Indeks Pengangguran.

- Berdasar batas bahaya sekitar 6 %, tingkat pengangguran di Yaman sangat tinggi akibat konflik berkepanjangan, dengan data menunjukkan rata-rata sekitar 13,16% (1991-2023), mencapai puncaknya 18,65% pada 2021, dan tingkat pengangguran kaum muda bisa mencapai 33%.
- Angka ini terus menjadi tantangan besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya, dengan perempuan dan pemuda menjadi kelompok yang paling rentan.

Angka dan Tren Pengangguran di Yaman:

- Rata-rata: 13,16% (1991-2023).
- Tertinggi: 18,65% pada tahun 2021.
- Terendah: 8,14% pada tahun 1992.
- Kaum Muda: Sekitar 33%.
- Perempuan: Tingkat pengangguran perempuan (26,1%) dua kali lipat lebih tinggi dari laki-laki (12,3%) berdasarkan survei 2013-2014.

Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran:

- Konflik dan Perang Saudara: Menghancurkan infrastruktur dan ekonomi, menyebabkan penurunan PDB hingga 50%.
- Krisis Ekonomi: Inflasi, devaluasi mata uang (rial Yaman), dan kurangnya bahan baku industri.
- Krisis Kemanusiaan: Kerawanan pangan dan sanitasi yang parah membebani populasi.
- Tantangan Pasar Kerja: Kurangnya peluang kerja bagi perempuan dan pemuda menjadi isu utama.

Dampak:

- Yaman menghadapi tekanan besar untuk mereformasi ekonomi guna mengatasi tingkat pengangguran yang ekstrem dan mencegah kerugian dukungan finansial internasional.

Indeks PDB Perkapita.

- *PDB per kapita Yaman sangat rendah* dan bervariasi tergantung sumber, tetapi terus menurun akibat konflik berkepanjangan; IMF memproyeksikan sekitar \$415 USD pada tahun 2025 (Turun dari \$471 pada 2024), sementara data historis menunjukkan penurunan signifikan dari \$2.356 USD (2010) menjadi sekitar \$821 USD (2024) menurut sumber lain, menjadikannya salah satu yang terendah di Asia.

Angka Terbaru (Estimasi 2025):

- Worldometer (IMF): \$415 USD.
- Trading Economics: \$821.46 USD (2024, dengan perkiraan tren menurun).

Konteks:

- *Status Ekonomi: Yaman adalah salah satu negara dengan PDB per kapita terlemah di Asia.*
- *Penyebab Penurunan: Konflik, blokade, inflasi, dan penurunan bantuan telah memperburuk kondisi ekonomi.*

Kesimpulan, PDB per kapita Yaman berada pada level sangat rendah dan mengalami

penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kondisi ekonomi yang sangat rentan.

Indeks Kesetaraan Gender.

- Yaman memiliki tingkat kesetaraan gender yang sangat rendah, sering kali berada di peringkat terbawah secara global, dengan kesenjangan signifikan dalam partisipasi ekonomi, pendidikan, dan perwakilan politik, diperburuk oleh konflik berkepanjangan yang membatasi mobilitas perempuan, akses ke layanan dasar, dan meningkatkan risiko kekerasan serta pernikahan dini.
- Indeks Kesenjangan Gender (GII) menempatkan Yaman sangat rendah, menunjukkan diskriminasi struktural yang parah dan hambatan hukum serta budaya.

Indikator Utama Kesenjangan Gender di Yaman:

- Partisipasi Ekonomi: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sangat rendah (4.9% pada 2024) dibandingkan laki-laki (60.5%), dengan partisipasi perempuan menurun sejak 1990.
- Pendidikan: Terdapat kesenjangan literasi yang besar; 55% perempuan melek huruf vs 85% laki-laki pada 2015, dengan hambatan akses ke pendidikan dasar dan menengah.
- Kesehatan: Akses perempuan terhadap layanan kesehatan terbatas, dan perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan lainnya.
- Perwakilan Politik: Partisipasi perempuan di ranah publik sangat rendah, dengan representasi di parlemen kurang dari 10%.
- Hukum & Budaya: Perempuan memerlukan izin wali laki-laki untuk menikah atau mendapat perawatan kesehatan, dan sistem hukum tidak memadai melindungi mereka dari kekerasan. Pernikahan anak (52% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun) adalah masalah besar.
- Konflik: Konflik memperburuk situasi, membatasi mobilitas, dan membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan.

Peringkat Global:

- *Yaman termasuk di antara negara dengan tingkat kesetaraan gender terendah di dunia.*
- Pada 2021, Yaman menduduki peringkat 155 dari 156 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia.
- Yaman juga termasuk dalam sepuluh negara dengan skor GII terburuk secara keseluruhan, menempati posisi terakhir di antara negara yang datanya tersedia.

Secara keseluruhan, kesenjangan gender di Yaman mencerminkan masalah yang kompleks akibat kombinasi struktur hormon agresif gender-pria sepanjang ribuan tahun, norma budaya yang konservatif, hambatan hukum, dan dampak dari konflik berkepanjangan yang melumpuhkan.

## **Pakistan**

Konstitusi

Konstitusi Pakistan yang berlaku saat ini adalah Konstitusi 1973, yang merupakan hukum tertinggi negara dan menetapkan Pakistan sebagai Republik Islam dengan sistem parlementer, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan Presiden sebagai kepala negara seremonial. Dokumen ini mengadopsi Islam sebagai agama negara, menjamin kesetaraan dan hak-hak fundamental bagi semua warga negara (termasuk minoritas), serta menetapkan Mahkamah Agung sebagai badan yudisial tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan konstitusional. Konstitusi ini telah mengalami banyak amandemen sejak disetujui, menjadikannya dasar hukum yang terus berkembang.

#### Butir Utama Konstitusi Pakistan 1973:

- Nama Resmi: Republik Islam Pakistan.
- Bentuk Negara: Republik Islam Federal.
- Sistem Pemerintahan: Parleментар.
- Eksekutif: Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dan Presiden adalah kepala negara seremonial.
- Legislatif: Unikameral (satu kamar), yaitu Majelis Nasional (National Assembly).
- Yudikatif: Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, dengan Pengadilan Tinggi di bawahnya, serta Pengadilan Syariah Federal.
- Ideologi: Berakar pada Islam dan menjamin kesetaraan serta keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang.

#### Sejarah Singkat:

- Pakistan memiliki beberapa konstitusi: 1956 (pertama), 1962, dan 1973.
- Konstitusi 1973 dirancang oleh pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto dan disetujui oleh Parlemen pada 10 April 1973, diratifikasi 14 Agustus 1973.
- Dokumen ini telah diamandemen berkali-kali, termasuk amandemen terbaru pada tahun 2024 yang fokus pada isu peradilan.

#### Agama utama

- Agama utama dan resmi Pakistan adalah Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduknya (lebih dari 96%), menjadikannya **negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia**, dengan mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, sementara agama minoritas termasuk Kristen, Hindu, dan lainnya.

#### Detail Agama di Pakistan:

- Islam (Mayoritas): *Islam adalah agama resmi negara* dan dianut oleh sekitar 96-97% penduduk.
  - Sunni: Mayoritas Muslim Pakistan adalah Sunni (sekitar 80-90%), banyak yang menganut mazhab Hanafi.
  - Syiah: Minoritas Syiah juga signifikan, menjadikan Pakistan sebagai rumah bagi populasi Syiah terbesar kedua di dunia.
- Agama Minoritas: Kelompok agama lain termasuk:
  - Kristen (sekitar 1.27-1.6%).
  - Hindu (sekitar 2.14%).
  - Ahmadiyah (dianggap non-Muslim secara konstitusional).
  - Sikh, Zoroastrianisme, dan lainnya.

#### Status Konstitusional:

- Konstitusi Pakistan menetapkan Islam sebagai agama negara dan mewajibkan hukum agar sesuai dengan ajaran Islam, meskipun warga negara non-Muslim memiliki hak untuk memeluk agama mereka.

#### Indeks Kepailitan Negara.

Tidak ada "indeks kepailitan" tunggal yang mengukur risiko kebangkrutan suatu negara secara langsung, namun beberapa peringkat dan indikator ekonomi memberikan gambaran tentang stabilitas dan kerangka penyelesaian kepailitan Pakistan.

- Peringkat Kemudahan Berbisnis (Resolving Insolvency): Dalam laporan *Doing Business 2020* dari Bank Dunia (proyek ini sekarang dihentikan dan digantikan oleh *Business Ready*), *Pakistan menempati peringkat ke-108 secara keseluruhan dalam kemudahan berbisnis*. Khusus untuk indikator "Resolving Insolvency" (Penyelesaian Kepailitan), peringkat Pakistan sedikit menurun 5 posisi pada tahun tersebut, meskipun telah ada

reformasi yang dilakukan.

- Kekuatan Kerangka Insolvensi: Data spesifik untuk Karachi menunjukkan *skor kekuatan kerangka insolvensi sebesar 71,9 dari 100*, dengan tingkat pemulihan (recovery rate) 44,9 sen per dolar yang hilang bagi kreditur yang dijamin. Hal ini menunjukkan adanya kerangka kerja, meskipun dengan tantangan dalam efisiensi pemulihan aset.
- Reformasi: *Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)* telah menerapkan reformasi untuk mempermudah penyelesaian kepailitan, termasuk memperkenalkan prosedur reorganisasi dan memperbaiki kelanjutan bisnis debitur selama proses insolvensi.

#### Indikator Stabilitas Ekonomi Umum

- Beberapa lembaga pemeringkat kredit internasional telah meningkatkan peringkat Pakistan baru-baru ini, yang menunjukkan membaiknya kepercayaan terhadap kemampuan negara tersebut untuk mengelola kewajiban eksternalnya:
- Fitch Ratings: Meningkatkan *Peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Pakistan menjadi 'B-' dari 'CCC+'* dan cukup memunculkan dengan prospek stabil pada April 2025. Peningkatan ini mencerminkan keyakinan akan kemampuan Pakistan untuk mempertahankan kemajuan dalam mempersempit defisit anggaran dan menerapkan reformasi struktural.
- S&P Global Ratings: Juga menaikkan peringkat kredit kedaulatan jangka panjang Pakistan menjadi 'B-' dari 'CCC+' pada Juli 2025, dengan prospek stabil.
- Global Investment Risk & Resilience Index (GIRRI) 2025: Meskipun ada perbaikan peringkat kredit, laporan Henley & Partners menempatkan Pakistan dalam kategori *"Paling Tidak Tangguh" (Least Resilient)* dengan peringkat ke-222 dari 226 negara. Ini menunjukkan kerentanan struktural yang mendasari ekonomi untuk menyerap guncangan.

Secara ringkas, Pakistan telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa peringkat ekonomi dan kerangka hukum terkait insolvensi, tetapi Pakistan *tetap berada pada peringkat yang relatif rendah secara global dalam hal ketahanan ekonomi dan kemudahan penyelesaian kepailitan.*

#### Indeks budaya bangsa

##### Aspek Budaya "Baik" (Kekuatan)

- Kolektivisme Kuat: Masyarakat Pakistan sangat kolektif, dengan loyalitas yang kuat terhadap kelompok, keluarga, dan komunitas. Hal ini menghasilkan ikatan sosial yang erat, sistem dukungan yang kuat, dan rasa kebersamaan.
- Filantropi dan Kedermwanaan: Warga Pakistan menunjukkan tingkat kedermwanaan yang tinggi. Sekitar 39,2% warga Pakistan dilaporkan telah menyumbang untuk amal, dan 56,9% membantu orang asing, angka yang lebih tinggi dari rata-rata global dalam beberapa survei.
- Ketahanan dan Kepuasan: Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi, survei menunjukkan bahwa 71% warga Pakistan menyatakan puas dengan kualitas hidup mereka, dan negara ini menempati peringkat yang relatif baik dalam indeks suasana hati (mood index) di masa lalu.
- Warisan Sufi yang Kaya: Negara ini memiliki warisan budaya Sufi yang kuat dan kaya, yang memengaruhi nilai-nilai agama, sastra, dan mistisisme, menciptakan lanskap budaya yang beragam dan mendalam.
- Media yang Outspoken (Terus Terang): Media Pakistan dikenal sebagai salah satu yang paling terus terang di Asia Selatan, memainkan peran penting dalam mengungkap korupsi dan perdebatan politik.

### Aspek Budaya "Buruk" (Tantangan)

- Penghindaran Ketidakpastian Tinggi: Budaya ini cenderung menghindari ketidakpastian, yang mengarah pada kebutuhan akan aturan, norma, dan struktur formal yang kaku. Hal ini terkadang menghambat fleksibilitas dan pengambilan risiko.
- Jarak Kekuasaan (Hierarki): Terdapat penerimaan yang tinggi terhadap distribusi kekuasaan yang tidak setara, menghasilkan struktur masyarakat dan organisasi yang hierarkis. Hal ini dapat membatasi pengambilan keputusan dari tingkat bawah dan inovasi.
- Indeks Perdamaian yang Rendah: Pakistan berada di antara 20 negara yang paling tidak damai di dunia, menempati peringkat ke-144 dari 163 negara dalam Indeks Perdamaian Global 2025.
- Korupsi dan Akuntabilitas: Indikator menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah yang rendah, dengan peringkat yang buruk dalam indeks korupsi global, yang mencerminkan tantangan tata kelola di negara tersebut.
- Pengekangan (Restraint) Tinggi: Budaya Pakistan dinilai sangat terkendali (restrained), di mana pemenuhan keinginan dan dorongan diatur secara ketat oleh norma sosial, yang dapat membatasi ekspresi diri individu.

### Indeks demokrasi.

- Indeks demokrasi global mengklasifikasikan Pakistan sebagai 'rezim otoriter', dan dengan peringkat nan terus menurun.
- Pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan di Pakistan, termasuk pada tahun 2024, secara luas dinilai ternoda oleh tuduhan kecurangan dan intervensi yang serius, sehingga diragukan prinsip "jurdil" (jujur dan adil) dapat terpenuhi.

### Indeks Demokrasi Pakistan (2024-2025)

Beberapa laporan dari lembaga internasional terkemuka menunjukkan status demokrasi di Pakistan:

- Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index: Dalam laporan Indeks Demokrasi EIU terbaru, Pakistan diklasifikasikan sebagai 'rezim otoriter' dengan skor rendah 2,84 (skala 0-10). Pakistan turun enam peringkat ke posisi 124 dari 160 negara, menempatkannya di antara 10 negara dengan kinerja terburuk dalam hal demokrasi.
- V-Dem Institute (Varieties of Democracy): Laporan V-Dem mengindikasikan penurunan berkelanjutan dalam indeks demokrasi elektoral Pakistan. Pakistan berada dalam kategori "otokrasi elektoral" (electoral autocracy), di mana pemilu diadakan, tetapi tanpa komponen demokrasi fundamental lainnya seperti kebebasan berekspresi dan berserikat yang memadai.
- Freedom House: Dalam laporan "Freedom in the World 2025", Pakistan dikategorikan sebagai negara "Partly Free" (Sebagian Bebas), namun mencatat penurunan signifikan dalam aspek kredibilitas pemilu dan fungsi pemerintah terpilih.

### Kondisi Pemilu Jurdil (Jujur dan Adil)

Pemilihan umum di Pakistan, khususnya Pemilu 2024, menghadapi kritik tajam terkait kejujuran dan keadilannya:

- Intervensi dan Represi Politik: Organisasi hak asasi manusia dan pemantau independen telah menyatakan keraguan serius mengenai kredibilitas Pemilu 2024 karena adanya tindakan keras pemerintah yang didukung militer terhadap partai politik oposisi utama (PTI yang dipimpin Imran Khan).
- Tuduhan Kecurangan: Misi pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil Pakistan melaporkan kekhawatiran serius tentang penanganan hasil pemungutan suara, termasuk

perbedaan data antara tempat pemungutan suara dengan hasil konsolidasi resmi. Terdapat klaim bahwa pejabat komisi pemilihan mengubah hasil di beberapa daerah pemilihan untuk menguntungkan kandidat koalisi pemerintah.

- Kekerasan: Proses pemilu diwarnai oleh insiden kekerasan, serangan bom, dan penjegalan politisi, yang semakin memperburuk lingkungan pemilu yang kondusif.

Secara keseluruhan, konsensus dari berbagai lembaga pemantau internasional dan lokal adalah bahwa *demokrasi di Pakistan sedang mengalami kemunduran dan pemilunya belum mencerminkan proses yang sepenuhnya jujur dan adil.*

Indeks pendidikan.

- Indeks pendidikan Pakistan menunjukkan halangan/tantangan signifikan, terutama dalam hal kualitas dan akses, dengan jutaan anak tidak bersekolah dan skor rendah pada tes internasional seperti TIMSS, meskipun ada kemajuan dalam pendidikan tinggi dan penggunaan Bahasa Inggris.
- Negara ini menghadapi "kemiskinan belajar" (anak tidak bisa baca-tulis dasar) nan-tinggi (77%), infrastruktur terbatas (sekolah dengan 1 guru/ruang kelas), kesenjangan gender, dan peringkat rendah pada indeks pengetahuan global (120 dari 141 negara).

Indikator Utama:

- Tantangan Akses & Kualitas:
  - Anak Tidak Sekolah: Jutaan anak (sekitar 22,8 juta menurut UNICEF 2020) tidak bersekolah.
  - Kemiskinan Belajar: 77% anak di akhir sekolah dasar tidak bisa membaca teks sederhana (2025).
  - Infrastruktur: 29% sekolah dasar hanya punya 1 guru; 18% hanya 1 ruang kelas (data 2014-2015).
  - Skor Tes Internasional: Skor Matematika (328) & Sains (290) di TIMSS 2019 jauh di bawah rata-rata (500).
- Kekuatan & Kemajuan:
  - Pendidikan Tinggi: Universitas Pakistan mulai masuk peringkat internasional (NUST, LUMS).
  - Bahasa Inggris: Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar memberi keunggulan global bagi sebagian siswa.
  - Peningkatan Pendaftaran: Pendaftaran sekolah dasar meningkat dari 81,3% (2005) menjadi 95,4% (2019).
- Kesenjangan: Kesenjangan gender masih nyata, dengan anak perempuan seringkali lebih terdampak.

Ringkasan: Pakistan berada di persimpangan jalan penuh risiko, dengan upaya meningkatkan akses pendidikan dasar dalam lingkungan krisis-kualitas yang serius, terutama di tingkat sekolah dasar, meskipun sektor pendidikan tinggi menunjukkan tanda-tanda positif.

Indeks pengangguran.

Indeks pengangguran di Pakistan bervariasi tergantung sumber data, namun tren terbaru menunjukkan peningkatan, dengan angka sekitar 5,47% hingga 6,9% (melebihi ambang batas 5%) pada tahun 2024/2025, naik dari tahun sebelumnya, mencerminkan masalah ketenagakerjaan akibat pertumbuhan populasi dan masalah struktural seperti kualitas pendidikan, meskipun sektor jasa berkembang pesat.

Angka Terbaru (2024-2025):

- Trading Economics (Bank Dunia): Menurun menjadi 5,50% pada 2024, turun dari

5,70% (2023).

- Macrotrends: 5,47% pada 2024, naik 0,06% dari 2023.
- CEIC Data: Melaporkan 6,9% untuk 2025.
- Statista (Prakiraan 2025): Memperkirakan naik menjadi 8,00%.
- Dawn (November 2025): Menunjukkan lonjakan pengangguran menjadi 5,9 juta jiwa (naik 31%) pada 2024-2025.

#### Tren dan Penyebab:

- Peningkatan Jumlah Penganggur: Terjadi peningkatan signifikan jumlah penganggur, mencapai 5,9 juta jiwa pada 2024-2025.
- Tekanan Pasar Kerja: Tingginya pertumbuhan penduduk menciptakan tekanan besar pada pasar kerja karena pasokan tenaga kerja melebihi permintaan, demikian menurut Hassan Abbas di Medium.
- Kualitas Pendidikan: Kurikulum yang ketinggalan zaman tidak membekali lulusan dengan keterampilan relevan, meningkatkan pengangguran terdidik.
- Sektor Ekonomi: Meskipun sektor jasa (perbankan, TI) berkembang, pertanian tetap penting, tetapi urbanisasi untuk mencari kerja di kota tetap menjadi tren, seperti dijelaskan di Statista.

#### Secara Historis:

- Dengan batas internasional 5 %, rata-rata tingkat pengangguran historis antara 1986-2024 adalah sekitar 5,46%, dengan titik tertinggi 8,30% (2003) dan terendah 2,30% (2016).

Kesimpulannya, indeks pengangguran Pakistan sedang menghadapi kenaikan, didorong oleh faktor struktural dan demografis, meskipun angka pastinya bervariasi antar laporan, dengan perkiraan tahun 2025 menunjukkan angka di atas 5% hingga 8%.

#### Indeks PDB Perkapita.

- PDB per kapita Pakistan bervariasi tergantung sumber dan tahun, namun pada tahun 2024-2025 diperkirakan sekitar \$1,485 - \$1,707 USD, dengan tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (misalnya \$1,396 USD pada 2023) dan mencapai tertinggi historisnya dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan ekonomi yang berkembang meskipun menghadapi tantangan stabilitas dan populasi besar.

#### Data Terkini (Estimasi/Proyeksi):

- 2025 (IMF): \$1,707 USD (naik dari \$1,574 USD di 2024).
- 2024 (Bank Dunia): \$1,485 USD.
- 2023 (CEIC): \$1,396.476 USD.

#### Tren Historis & Konteks:

- Rata-rata: PDB per kapita Pakistan rata-rata sekitar \$991.58 USD dari 1960-2024, namun mencapai puncak \$1,696.96 USD pada 2022.
- Pertumbuhan: Ekonomi Pakistan adalah ekonomi semi-industri yang sedang berkembang, namun pertumbuhan PDB perlu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cepat untuk meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan.

#### Perbedaan Data:

- Angka berbeda karena sumber berbeda (IMF, Bank Dunia, CEIC, dll.) dan metodologi berbeda (PDB Nominal vs. PPP).

Secara umum, Pakistan menunjukkan peningkatan PDB per kapita dalam beberapa tahun terakhir, mendekati atau melampaui \$1,500 USD per kapita pada 2024-2025, dan masih menghadapi tantangan struktural.

### Indeks Kesetaraan gender.

- Pakistan menghadapi kesenjangan gender yang signifikan dan tingkat kekerasan berbasis gender (KBG) yang tinggi, sering kali menempati *peringkat sangat rendah dalam indeks global seperti* Global Gender Gap Report (GGGR) (peringkat 148 pada 2025), dengan masalah meliputi partisipasi ekonomi perempuan, pendidikan, hak kesehatan, serta tingginya kasus "honor killing" dan kekerasan domestik yang mengakar kuat dalam budaya patriarki. Hukum positif Pakistan telah mereformasi untuk memberantas hukum-adat pembunuhan demi kehormatan (honor killing) yang berlangsung ribuan tahun, terutama melalui amandemen tahun 2016 yang menetapkan hukuman minimal penjara seumur hidup untuk kasus *qatl-i-amd* (pembunuhan sengaja) yang dibalut motif kehormatan, dan melarang pengampunan oleh keluarga korban. Meskipun demikian, implementasi hukum masih menghadapi tantangan karena adanya hukum adat (jirga) dan interpretasi hukum pidana (Qisas & Diyat) yang terkadang memungkinkan keringanan atau pembebasan pelaku, menyebabkan praktik ini masih terjadi.
- Indeks Pembangunan Manusia (HDI) juga menunjukkan skor rendah (GDI 0.838), mencerminkan ketimpangan struktural, terutama di daerah pedesaan dan konflik, di mana perempuan minim akses layanan dan pengambilan keputusan, menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

### Indeks dan Peringkat Global

- Global Gender Gap Report (GGGR): Pakistan berada di peringkat 148 dari 148 negara pada tahun 2025, berarti negara terendah, menunjukkan kemunduran dan tantangan besar dalam kesetaraan gender, terutama di bidang partisipasi ekonomi dan pendidikan.
- Indeks Ketidaksetaraan Gender (UNDP): Peringkat 161 dari 191 negara pada tahun 2022, menunjukkan ketidaksetaraan yang tinggi.

### Indikator Kesenjangan Gender & Kekerasan

- Pendidikan: Banyak anak perempuan putus sekolah, dengan tingkat pendaftaran menurun drastis pada jenjang menengah, bahkan hampir 50% perempuan tidak memiliki pendidikan dasar.
- Kesehatan: Perempuan mengalami pengabaian kesehatan, gizi buruk, kurangnya hak reproduksi, dan akses terbatas ke layanan kesehatan, diperparah oleh preferensi anak laki-laki.
- Partisipasi Ekonomi: Partisipasi ekonomi perempuan terus menurun karena ketimpangan struktural dan patriarki, yang membatasi otonomi mereka.
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG): Sangat umum terjadi (kekerasan dalam rumah tangga mencapai 70-90% di pedesaan), dengan bentuk seperti pemerkosaan, serangan asam, pembakaran, dan "honor killing" (pembunuhan demi kehormatan).
- Budaya Patriarki: Sistem sosial ribuan tahun yang mendominasi laki-laki memperkuat diskriminasi, kekerasan, dan membatasi hak perempuan untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka.

### Faktor Penyebab & Dampak

- Norma Patriarki: Budaya ribuan tahun yang mengakar membatasi otonomi perempuan dan memperkuat dominasi laki-laki, membuat kekerasan gender menjadi hal rutin.
- Konflik & Bencana: Di daerah seperti Balochistan dan KPK, konflik berkepanjangan memperburuk akses perempuan terhadap layanan dasar dan meningkatkan korban jiwa.
- Kemiskinan: Ketimpangan gender berkontribusi pada feminisasi kemiskinan, sementara masalah ek

## Iran

### Konstitusi

Konstitusi Iran adalah Konstitusi Republik Islam Iran 1979 (diamandemen 1989) yang menetapkan sistem pemerintahan hibrida teokratis-demokratis, di mana hukum tertinggi negara didasarkan pada hukum Islam (Syariah) dan kedaulatan Tuhan, tetapi juga mengakui pemilihan umum untuk presiden dan parlemen (*Majlis*), dengan kekuasaan pengawasan dipegang oleh lembaga ulama seperti Dewan Wali dan Pemimpin Tertinggi (Rahbar). Sistem ini mengintegrasikan unsur-unsur Syiah Dua Belas Imam, dengan Islam sebagai agama resmi.

Butir Utama Konstitusi demokrasi berbasis agama:

- Bentuk Pemerintahan: Republik Islam, menggantikan monarki setelah Revolusi 1979.
- Dasar Hukum: Hukum Islam (Syariah), berlaku untuk semua undang-undang dan peraturan.
- Sistem Pemerintahan: Campuran antara unsur teokratis (ulama, Pemimpin Tertinggi) dan demokratis (pemilihan presiden, parlemen).
- Lembaga Utama:
  - Pemimpin Tertinggi (Rahbar): Kepala negara dan agama, memiliki kekuasaan tertinggi.
  - Dewan Wali (Guardian Council): Terdiri dari ulama dan pengacara, menyaring kandidat dan undang-undang agar sesuai dengan Islam dan konstitusi.
  - Presiden: Kepala eksekutif, dipilih melalui pemilihan umum.
  - Majlis (Parlemen): Badan legislatif, anggotanya dipilih.
- Amandemen: Konstitusi asli 175 pasal diubah menjadi 177 pasal pada tahun 1989.
- Kedaulatan: Kedaulatan berada di tangan Tuhan, tetapi diimplementasikan melalui suara rakyat (pemilihan umum dan referendum).

Sistem Ekonomi:

- Mengakui tiga sektor ekonomi: publik, swasta, dan koperasi.
- Memiliki kebijakan privatisasi untuk mengurangi dominasi negara di sektor strategis, meskipun pemerintah tetap mempertahankan kendali inti atas industri-industri utama.

### Agama utama

Sepanjang ribuan tahun, agama utama di Iran adalah Islam Syiah (Syiah Dua Belas Imam), yang merupakan agama resmi negara dan dianut oleh sekitar 90% penduduk Muslim Iran, dengan mayoritas penduduk menganutnya sejak era Dinasti Safawi dan diperkuat setelah Revolusi Islam 1979. Sebagian kecil penduduk Iran menganut Islam Sunni, Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan agama minoritas lain yang diakui secara resmi.

Detail Agama di Iran:

- Islam Syiah: Mayoritas mutlak (sekitar 90%) penduduk Iran adalah Muslim Syiah, terutama cabang Dua Belas Imam (Ithnā 'Asharī), menjadikannya agama resmi negara.
- Islam Sunni: Sekitar 5-10% Muslim Iran menganut Sunni, umumnya etnis Kurdi, Turkmen, Balochi, dan Arab yang tinggal di wilayah perbatasan.
- Agama Lain: Iran juga mengakui agama minoritas seperti Kristen (Armenia dan Assyria), Yahudi, dan Zoroaster, yang memiliki komunitas dan tempat ibadah di Iran.

Latar Belakang:

- Islam masuk ke Persia (Iran) sejak penaklukan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Rasyidin.
- Iran menjadi benteng mazhab Syiah sejak Dinasti Safawi (abad ke-16) yang

memaksakan Syiah sebagai agama resmi.

- Setelah Revolusi Islam 1979, Iran menjadi Republik Islam dengan konstitusi yang berbasis teokrasi Syiah.

#### Indeks Kepailitan Negara.

Tidak ada satu pun "indeks kepailitan" tunggal yang mengukur risiko kebangkrutan suatu negara secara gamblang. Sebaliknya, analis dan lembaga keuangan menilai risiko ini menggunakan berbagai indikator ekonomi utama, yang menunjukkan bahwa ekonomi Iran menghadapi tantangan signifikan dan risiko tinggi, tetapi belum resmi bangkrut sebagai sebuah negara.

Berikut adalah beberapa indikator utama yang relevan dengan risiko kepailitan Iran:

- **Peringkat Risiko Kredit Negara:** Peringkat kredit negara (country credit rating) dari lembaga seperti OECD menempatkan risiko Iran pada level sangat tinggi (Peringkat 7), *menunjukkan kemungkinan besar ketidakmampuan atau keengganan untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri.*
- **Utang Luar Negeri:** Utang luar negeri Iran relatif rendah, dilaporkan sebesar USD 4,9 miliar pada tahun 2025. Angka yang rendah ini secara paradoks mencerminkan *isolasi negara tersebut dari pasar modal global akibat sanksi*, bukan kesehatan fiskal yang baik.
- **Inflasi:** *Iran menghadapi tingkat inflasi yang sangat tinggi, meningkat menjadi 45,30% pada September 2025. Hiperinflasi mengikis daya beli dan stabilitas ekonomi.*
- **Pertumbuhan PDB:** *Pertumbuhan PDB riil Iran diproyeksikan melambat drastis menjadi hanya 0,6% pada tahun 2025, turun dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tekanan ekonomi yang signifikan.*
- **Sanksi dan Isolasi:** *Sanksi internasional yang luas membatasi akses Iran ke pasar global, terutama ekspor minyak, yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Hal ini memperburuk kerentanan struktural dan keuangan.*
- **Defisit Anggaran:** Beberapa laporan menunjukkan *defisit anggaran yang sangat besar, dengan perkiraan dari IMF menempatkan angka tersebut pada level yang diklasifikasikan oleh beberapa analis sebagai "kebangkrutan fungsional" dalam hal kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar dan investasi.*
- **Ketidakstabilan Mata Uang:** *Rial Iran terus mengalami devaluasi, mencapai rekor terendah terhadap dolar AS, yang mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi.*

Secara keseluruhan, meskipun Iran memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, ekonominya sangat tertekan oleh sanksi internasional (?), mismanajemen kebijakan, dan ketidakstabilan politik. Indikator-indikator ini menunjukkan ekonomi yang rapuh dengan risiko gagal bayar (secara efektif "pailit" dalam kemampuan memenuhi kewajiban) yang tinggi, terutama terkait utang luar negeri di mata kreditur internasional

#### Indeks budaya bangsa

Sepanjang ribuan tahun, pengaruh agama pada tingkat budaya di Iran sangat mendalam, di mana Islam Syiah telah menjadi basis ideologi dan sistem sosial-politik negara tersebut sejak berabad-abad lalu. Budaya Iran modern merupakan perpaduan yang kompleks antara warisan Persia kuno dan ajaran Islam.

#### Indeks Budaya Bangsa Iran dan Pengaruh Agama

##### 1. Agama Resmi dan Dominasi Syiah:

- Islam Syiah adalah agama resmi negara Iran, dengan sekitar 90% populasi menganut mazhab ini. Dominasi ini bermula sejak berdirinya Dinasti Shafawi pada awal abad

ke-16, yang menjadikan Syiah sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Iran.

- Sebaliknya, sebagian besar negara tetangga di Timur Tengah didominasi oleh Sunni, menjadikan Iran sebagai benteng Syiah di kawasan tersebut.
2. Pengaruh dalam Sistem Pemerintahan dan Hukum:
    - Revolusi Islam Iran tahun 1979 menumbangkan monarki Syah-Iran dan mengokohkan Syiah sebagai basis ideologi negara.
    - Sistem politik Iran saat ini adalah Republik Islam dengan sistem *Wilayat al-Faqih*, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin spiritual (ulama) menggantikan monarki, sebagai pengawas jalannya negara. Hukum dan pendidikan di Iran sangat dipengaruhi oleh warisan budaya Islam ini.
  3. Pengaruh dalam Seni dan Arsitektur:
    - Warisan Islam Syiah memengaruhi seni, arsitektur, dan sastra Iran.
    - Masjid-masjid di Iran memiliki desain indah dan berfungsi sebagai pusat kehidupan spiritual masyarakat.
    - Situs ziarah Syiah juga menjadi tujuan penting bagi umat Islam, terutama Syiah, dari seluruh dunia.
  4. Tradisi dan Norma Sosial:
    - Nilai-nilai inti budaya Iran berumur ribuan tahun, seperti pentingnya keluarga, keramahan, dan menghormati orang tua, berakar kuat dalam ajaran agama dan tradisi Persia kuno.
    - Ritual keagamaan berumur ribuan tahun, seperti peringatan Asyura (memperingati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein bin Ali), adalah bagian penting dari budaya dan identitas nasional.
    - Produk budaya ribuan-tahun yang mendunia seperti karpet Persia, meskipun berakar dari kebutuhan dasar nomaden, kini menampilkan desain rumit yang merefleksikan estetika budaya yang dipengaruhi agama.

Secara keseluruhan, agama bukan sekadar aspek spiritual di Iran, tetapi juga kekuatan utama yang membentuk struktur sosial, politik, dan identitas budaya bangsa tersebut secara menyeluruh.

Indeks demokrasi Iran.

Sebagai negara berbasis syariah, Iran diklasifikasikan sebagai negara "tidak bebas" dan berkinerja rendah pada indeks demokrasi global. Sistem pemerintahannya adalah teo-demokrasi, yang berarti kedaulatan rakyat berada di bawah kedaulatan Tuhan yang diwakili oleh pemimpin tertinggi agama.

Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi internasional, status demokrasi di Iran sangat rendah sbb:

- Freedom House: Dalam laporan "Freedom in the World 2024", Iran memperoleh skor total 11 dari 100, dan dikategorikan sebagai negara "Tidak Bebas". Skor ini menunjukkan penurunan satu poin dari tahun 2023.
- International IDEA (Global State of Democracy): Iran berada di kisaran rendah di semua kategori kerangka kerja Global State of Democracy dan termasuk dalam 25 persen terbawah negara-negara di dunia dalam sebagian besar faktor kinerja demokrasi.
- Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index: Indeks EIU mengklasifikasikan Iran sebagai "rezim otoriter" (authoritarian regime).
- Varieties of Democracy (V-Dem): Pada tahun 2024, indeks demokrasi elektoral Iran tercatat sebesar 0,167 (dalam skala 0 hingga 1), yang jauh di bawah rata-rata global

0,489.

- Pemilihan umum di Iran diadakan secara berkala, *tetapi dianggap tidak memenuhi standar demokrasi internasional* karena adanya pengaruh kuat dari Dewan Penjaga (Guardian Council), sebuah badan tidak terpilih yang mendiskualifikasi kandidat yang dianggap tidak cukup loyal kepada pendirian ulama. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader), Ayatollah Ali Khamenei.

### Agama di Iran

Agama dan negara tidak terpisah di Iran; sebaliknya, Islam Syiah Ja'fari Dua Belas Imam adalah agama resmi negara dan konstitusi menetapkan bahwa semua hukum dan peraturan harus didasarkan pada "kriteria Islam" dan interpretasi resmi syariah.

- Mayoritas Populasi: Sekitar 99,4% populasi Iran adalah Muslim, dengan 90-95% di antaranya adalah penganut Syiah.
- Minoritas Agama: Kelompok minoritas agama yang diakui secara konstitusional (Zoroastrian, Yahudi, dan Kristen Armenia/Asyur) memiliki kursi parlemen yang dicadangkan, tetapi hak-hak mereka masih terbatas, dan agama minoritas lainnya, seperti Baha'i, menghadapi diskriminasi dan penganiayaan berat.

Singkatnya, Iran adalah republik Islam dengan sistem pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keagamaan Syiah, yang menghasilkan *peringkat indeks demokrasi yang sangat rendah dan pembatasan signifikan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan beragama*.

### Indeks pendidikanran.

Indeks pendidikan menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan secara umum, dan khususnya dalam pendidikan wanita, meskipun peringkat globalnya bervariasi tergantung pada indeks yang digunakan.

### Indeks Pendidikan Bangsa Iran

- Peringkat Global: Iran berada di peringkat menengah dalam tabel liga pendidikan global, menempati peringkat ke-88 dari 162 negara dalam peringkat keseluruhan berdasarkan gelar akademis. Dalam peringkat pendidikan USN tahun 2024, Iran menempati posisi ke-68.
- Tingkat Literasi: Tingkat melek huruf di kalangan populasi dewasa (usia 15+) adalah 88,9%, di atas rata-rata global sebesar 86,2%.
- Pengeluaran: *Sekitar 20% dari pengeluaran pemerintah dan 5% dari PDB dialokasikan untuk pendidikan, tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan negara berkembang lainnya.*
- Output Ilmiah: *Iran menghasilkan jumlah insinyur tertinggi ketiga di dunia dan menempati peringkat ke-16 secara global dalam jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2020.*

### Indeks Pendidikan Wanita Iran

Pendidikan wanita di Iran telah mengalami peningkatan pesat, terutama sejak Revolusi Islam tahun 1979, dengan partisipasi yang tinggi di tingkat pendidikan tinggi.

- *Tingkat Literasi Wanita: Tingkat melek huruf wanita muda (usia 15-24) mencapai 98,93% pada tahun 2022, meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata dunia. Tingkat melek huruf wanita dewasa (usia 10-49) pada tahun 2023 mencapai 96,1%.*
- Partisipasi Pendidikan Tinggi: *Mayoritas mahasiswa di universitas Iran (sekitar 60%) adalah wanita. Iran memiliki rasio pendaftaran perempuan terhadap laki-laki tertinggi di tingkat sekolah dasar secara global.*

- Bidang Studi: *Perempuan sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu kedokteran, dan seni. Bahkan, 70% lulusan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) di Iran adalah perempuan, salah satu yang tertinggi di dunia.*
- Indeks Ketimpangan Gender: *Meskipun pencapaian pendidikan wanita tinggi, Iran masih menempati peringkat yang relatif rendah dalam indeks ketimpangan gender secara keseluruhan (peringkat ke-140 dari 177 negara pada tahun 2023), terutama karena kesenjangan dalam partisipasi ekonomi dan politik.*

Secara keseluruhan, Iran telah mencapai paritas gender yang signifikan dalam akses dan pencapaian pendidikan, meskipun tantangan masih ada dalam menerjemahkan pencapaian pendidikan ini menjadi partisipasi yang setara di pasar tenaga kerja dan posisi senior.

### Indeks pengangguran

Tingkat pengangguran di Iran pada Kuartal Keempat 2024 tercatat 7,20% (batas-atas internasional sekitar 5%), mencapai rekor terendah dalam data historis, turun dari 7,50% di kuartal sebelumnya, dengan tingkat pengangguran kaum muda sekitar 20,20% pada periode yang sama. Meskipun ada pemulihan ekonomi, Iran masih menghadapi tantangan lapangan kerja, terutama bagi perempuan dan kaum muda, dengan perkiraan tingkat pengangguran keseluruhan bisa mencapai 9,50% pada tahun 2025.

#### Data Kunci:

- Tingkat Pengangguran (Q4 2024): 7,20%.
- Tingkat Pengangguran Pemuda (Q4 2024): 20,20%.
- Rata-rata (2001-2024): 11,04%.
- Perkiraan (2025): 9,50% (berdasarkan data Statista).

#### Tren dan Tantangan:

- Penurunan Terbaru: Tingkat pengangguran menurun di akhir tahun 2024, mencapai titik terendah historis.
- Masalah Pemuda & Wanita: Pengangguran tetap tinggi di kalangan pemuda dan perempuan, meskipun data partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan angka rendah (sekitar 13,45% pada 2024).
- Ketergantungan Ekonomi: Aktivitas ekonomi Iran sangat bergantung pada pendapatan minyak, yang memengaruhi stabilitas lapangan kerja.
- Setengah Menganggur: Banyak orang yang dianggap "bekerja" sebenarnya mengalami setengah pengangguran (underemployment).

### Indeks PDB Perkapita

PDB per Kapita Iran bervariasi tergantung metode perhitungan (nominal atau PPP) dan sumber data, namun pada tahun 2024-2025 angkanya berkisar antara \$4.074 (nominal, perkiraan 2025) hingga sekitar \$16.224 (PPP, 2024), menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya beli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan data PDB per Kapita Nominal (USD) mencapai rekor tertinggi di tahun 2024 sekitar \$49.404.

#### Data PDB per Kapita Iran (Nominal & PPP) sebagai negara kaya-minyak:

- PDB per Kapita (PPP - Paritas Daya Beli):
  - 2024: Mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar \$ 16.224,04 USD.
  - Rata-rata (1990-2024): \$ 12.845,22 USD.
- PDB per Kapita (Nominal - USD):
  - 2024: Mencapai rekor tertinggi sebesar \$ 49.404,346 USD.
  - 2025 (Perkiraan IMF): \$ 4.074 USD, turun dari \$ 4.810 (2024).
  - 2025 (Statista): Diperkirakan mencapai \$3.690 (US\$3,69 ribu).

Hal Penting:

- PPP (Paritas Daya Beli): Mengukur daya beli relatif suatu mata uang dengan membandingkan harga barang dan jasa, sering kali memberikan gambaran lebih baik tentang standar hidup.
- Nominal (USD): Nilai PDB dibagi populasi menggunakan nilai tukar pasar, bisa berfluktuasi lebih banyak.

Data menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal daya beli (PPP) dan PDB Nominal, meskipun terdapat perbedaan antara perkiraan dan data aktual dari berbagai lembaga.

Indeks Kesetaraan gender

Berlatar budaya apartheid-gender sepanjang ribuan tahun, Iran menempati peringkat yang *sangat rendah dalam indeks kesetaraan gender global* dan memiliki *tingkat kekerasan domestik yang dilaporkan tinggi*, namun sering kali tidak ditangani secara memadai oleh sistem hukum.

Indeks Kesetaraan Gender

Iran secara konsisten berada di peringkat terbawah dalam laporan kesetaraan gender internasional.

- Laporan Kesenjangan Gender Global (World Economic Forum): Pada laporan tahun 2024, Iran *berada di peringkat 143 dari 146 negara yang dinilai*. Pada laporan tahun 2023, Iran berada di peringkat yang sama (143 dari 146 negara), hanya sedikit di atas Afghanistan dalam kelompok regionalnya.
- Kehidupan wanita amat tidak aman. Indeks Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Georgetown University): Pada tahun 2023, Iran berada *di peringkat 140 dari 177 negara dalam hal inklusi, keadilan, dan keamanan perempuan*.
- Partisipasi Politik dan Ekonomi: Hukum Syariah kesenjangan gender terlihat jelas dalam partisipasi angkatan kerja, di mana kurang dari 14% perempuan berpartisipasi dibandingkan lebih dari 67% laki-laki. *Hanya 5,6% kursi di parlemen Iran yang dipegang oleh perempuan per Februari 2024*.

Kekerasan Domestik

Berdasar budaya patriakis ribuan tahun, statistik menunjukkan prevalensi kekerasan domestik yang signifikan di Iran. Bagi banyak wanita nir mata-pencarian, pernikahan secara historis dan dalam beberapa konteks kontemporer adalah sumber utama keamanan finansial dan dukungan ekonomi, terutama dalam iklim kesempatan kerja Iran bagi wanita amat terbatas. Perlu di kemukakan bahwa tak semua pria Iran gemar melakukan kekerasan domestik.

- Prevalensi Tinggi: Sebuah studi skala besar di 28 ibu kota provinsi menemukan bahwa 66% perempuan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sekali sejak awal kehidupan pernikahan mereka. *Angka ini dilaporkan dua kali lipat rata-rata global*.
- Jenis Kekerasan: Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa kekerasan emosional (59%) lebih sering terjadi dibandingkan kekerasan fisik (45%) dan seksual (32%).
- Hambatan Hukum: Korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi hambatan hukum yang signifikan. Pengadilan Iran tidak mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga secara efektif karena celah hukum, dan RUU perlindungan perempuan dari kekerasan telah tertunda selama bertahun-tahun. Banyak korban tidak melaporkan insiden tersebut karena kurangnya dukungan negara dan konsekuensi hukum yang merugikan perempuan, seperti kehilangan hak asuh anak.

- Femicide (Pembunuhan Perempuan): Laporan dari Human Rights Watch pada Januari 2025 menyoroti peningkatan *kasus femicide* yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki. Setidaknya 93 kasus didokumentasikan dalam enam bulan pertama tahun 2024, meningkat hampir 60% dari tahun sebelumnya. Banyak perempuan yang dieksekusi suami di Iran adalah sebuah kekerasan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, data menunjukkan diskriminasi institusional yang meluas dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan di Iran, berkontribusi pada peringkat kesetaraan gender yang rendah dan prevalensi kekerasan domestik yang tinggi.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

PBB melaporkan kinerja ber SDG PBB nan-buruk untuk negara-negara tersebut di atas, makalah ini berupaya membedah sebab-musababnya, untuk kepentingan NKRI.

- Pertama. Genetika & tradisi patriarkat ribuan tahun bangsa  **mungkin**  menjadi penyebab ketimpangan hak-konstitusional & sosial kaum-perempuan bangsa/negara tersebut, menyebabkan SDM perempuan tak-menjadi komponen pembangunan kemakmuran bangsa.

Terdapat bangsa bangsa berstruktur hormon jahat, curang, ber-kecerdasan (IQ, EQ, SQ) rendah dan suka-kekerasan, sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Bangsa berkonstitusi mulia, misalnya bangsa yang berkeTuhanan Nan Maha-Esa yang adil dan Maha-Rahim, berkesadaran kebangsaan tunggal dalam sebuah negara-kesatuan berkeanekaragaman, bangsa pemuja keadilan-sosial nan-mulia dan bertekad menghapus kemiskinan-absolut, konstitusi berperangkat kelembagaan negara nan-berkerakyatanan, bangsa nan-suka kedamaian dalam mencari solusi melalui permusyawaratan win-win versi DPR/D nir-konflik. Contoh berbagai negara-gagal bert SDG tersebut diatas menunjukkan bangsa terpuruk ke dalam jurang kemiskinan/kesengsaraan tatkala demokrasi mati.

Sebagai anomali, terdapat pula berbagai negara-kaya maju-ekonomi dengan masalah KDRT. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jepang dan Korea Selatan merupakan isu serius yang sering tersembunyi karena dianggap masalah pribadi, meskipun pemerintah kedua negara telah meningkatkan upaya perlindungan korban, termasuk pusat konseling, hotline 24 jam, dan perintah perlindungan, namun kendala seperti stigma sosial, budaya tertutup untuk 'urusan keluarga', dan kurangnya kesadaran publik masih menjadi tantangan besar, terutama bagi perempuan migran dan kelompok rentan lainnya. Negara maju ekonomi ber KDRT tersebut memberi hak konstitusional bagi gender-perempuan sehingga mereka mampu berkinerja di sektor pemerintahan dan swasta.

Terdapat berbagai anomali lain, misalnya pembunuhan istri demi kehormatan-keluarga terjadi di India, kekerasan KDRT di Jepang dan Korsel, namun perempuan tetap saja dapat menjadi perdana-menteri.

- Kedua. Demokrasi adalah syarat utama kemakmuran bangsa ber GCG. Runtuhnya iklim demokrasi cq Pemilu Jurdil menyebabkan negara di-pimpin diktator yang pada umumnya berkepemerintahan-kleptokrasi, pada umumnya menyebabkan ketidak-stabilan politik cq pemberontakan & perang saudara,yang serta-merta menurunkan seluruh indeks-kemakmuran bangsa. Bangsa tiba-tiba menjadi miskin dan sengsara (kembali). Karena itu, indeks demokrasi bangsa merupakan indeks utama dalam ber SDG. Bila tak ada kebebasan ber demokrasi, maka SDG sulit direalisasi.

NKRI adalah negara anggota PBB yang tergolong negara paling aktif dalam ber SDG di muka-bumi, sehingga setiap lima tahun dipastikan lulus ujian pemilu-jurdil yang

membentuk Kabinet nan-demokratis.

Jayalah NKRI !

*Catatan Redaksi : Makalah ini adalah bagian kedua dari makalah SDG. Bagian pertama serial berjudul MAKALAH SDG.*